

RENSTRA 2019 – 2024
KECAMATAN KUALA MANDOR B



PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA



KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2019 - 2024 ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan Renstra Perubahan ini berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan kami sadari masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Demikian Renstra Perubahan ini kami buat untuk dijadikan bahan masukan dalam membuat dan mengambil kebijakan lebih lanjut, dan kepada pihak pihak yang telah membantu sehingga selesainya penyusunan Renstra Perubahan ini kami mengucapkan terima kasih.

Kuala Mandor B, 2021

CAMAT KUALA MANDOR B

MALUK, S.Pd

NIP.19660213 198608 1 001



DAFTAR ISI

	Hal	
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I. PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang.....	1	
B. Landasan Hukum.....	3	
C. Maksud Dan Tujuan.....	7	
D. Sistematika Penulisan	7	
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD		
A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9	
B. Sumber daya Perangkat Daerah	17	
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22	
D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30	
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI		
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	32	
3.2. Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34	
3.3. Telaahan Renstra K/L Renstra Perubahan	35	
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	35	
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN		
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah	43	
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		46
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...		48
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		57
BAB VII. PENUTUP		59



*RENSTRA Kecamatan Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024*



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan SKPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra Perubahan SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat



indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renstra Perubahan SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra Perubahan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra Perubahan SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dengan telah dilaksanakannya tahap RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahap Pertama Tahun 2019-2024, yang diprioritaskan pada :

1. Pembangunan dan Penyiapan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Pemerintahan, Agama dan Mental Spritual;
2. Pembangunan, Penyiapan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar di Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Air Bersih, Energi/Listrik, Telekomunikasi dan Informatika dalam menunjang Pembangunan Ekonomi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Membuka Isolasi Daerah;
3. Pembangunan dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Tinggi Berbasis Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Mengembangkan Kewirausahaan dan Potensi Ekonomi Kerakyatan



Secara Berkelanjutan dengan Tetap Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;

4. Pembangunan, Penyiapan dan Penataan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Menerapkan Prinsip Good Governance dan Clean Government.

Maka berdasarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahap Kedua Tahun 2020-2024, yang diprioritaskan pada :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya Saing Tinggi dan Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
2. Peningkatan, Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar untuk Menunjang Aksesabilitas dan Investasi Daerah ;
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Tinggi dalam Rangka Pemerataan Pembangunan, Mengurangi Kesenjangan Daerah dan Pengembangan Daya Saing/Keunggulan Daerah dengan Tetap Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup ;
4. Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Menerapkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Untuk itu Pemerintah Kecamatan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan kearah perbaikan, serta mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan organisasi, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran (*ouputs*) dan atau kinerja hasil (*outcomes*).



1.2 Landasan Hukum

Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2020-2024

disusun berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan, sbb :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun



- 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata



- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun



- 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 75);

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan SKPD Kecamatan Kuala Mandor B disusun dengan maksud menjabarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuala Mandor B dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta



pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B, antara lain adalah :

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2019-2024).
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Kuala Mandor B.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra Perubahan K/L dan Renstra
Perubahan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Camat

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kecamatan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat kecamatan;
8. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
10. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal kecamatan; dan



11. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Camat sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya.

Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan, administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
2. Penyelarasan dan kompilasi program kerja dan pelaksanaan tata usaha keuangan kecamatan;
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM organisasi kecamatan;
4. Pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan;
5. Pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan kecamatan;
6. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja kecamatan;



8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan dan penyelarasan rencana kerja serta pengolahan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
2. Penyiapan bahan penyelarasan dan kompilasi program kerja kecamatan;
3. Pelaksanaan tata usaha keuangan kecamatan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja kecamatan;
5. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan kecamatan;
6. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
2. Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Dinas;
4. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
5. Pelaksanaan urusan hukum;
6. Penyiapan bahan laporan tidak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
7. Pelaksanaan koordinasi sesuai tugas dan fungsinya;
8. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
11. Pelaksanaan urusan protokol dan kehumasan;



12. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
13. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
14. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian perlengkapan dan umum;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan;
2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
3. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
4. Pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
5. Pelaksanaan fasilitasi di bidang pemerintahan;
6. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat pemerintahan;
7. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi pemerintahan;
8. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas, Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.



Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Linmas

Mempunyai tugas melaksanakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban;
2. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
4. Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
6. Pelaksanaan pembinaan sosial dan politik;
7. Penyiapan penyelenggaraan pembinaan di bidang ideologi negara dan kesatuan bangsa;
8. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
9. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi ketentraman dan ketertiban;
10. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi ketentraman dan ketertiban; dan



11. Pelaksanaan tugas lain di serahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan, pembinaan administrasi pertanahan, prasarana dan fasilitas umum serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Program kerja dan rencana kegiatan di seksi ekonomi dan pembangunan;
2. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ekonomi dan pembangunan;
3. Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ekonomi dan pembangunan;
5. Pelaksanaan administrasi barang daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
6. Pelaksanaan administrasi pertanahan;
7. Penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;



8. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan;
9. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Kemasyarakatan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Seksi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Kemasyarakatan;
2. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang Kemasyarakatan;
3. Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang kesejahteraan masyarakat;
5. Pelaksanaan pembinaan kepemudaan, olahraga dan peranan wanita serta organisasi kemasyarakatan;

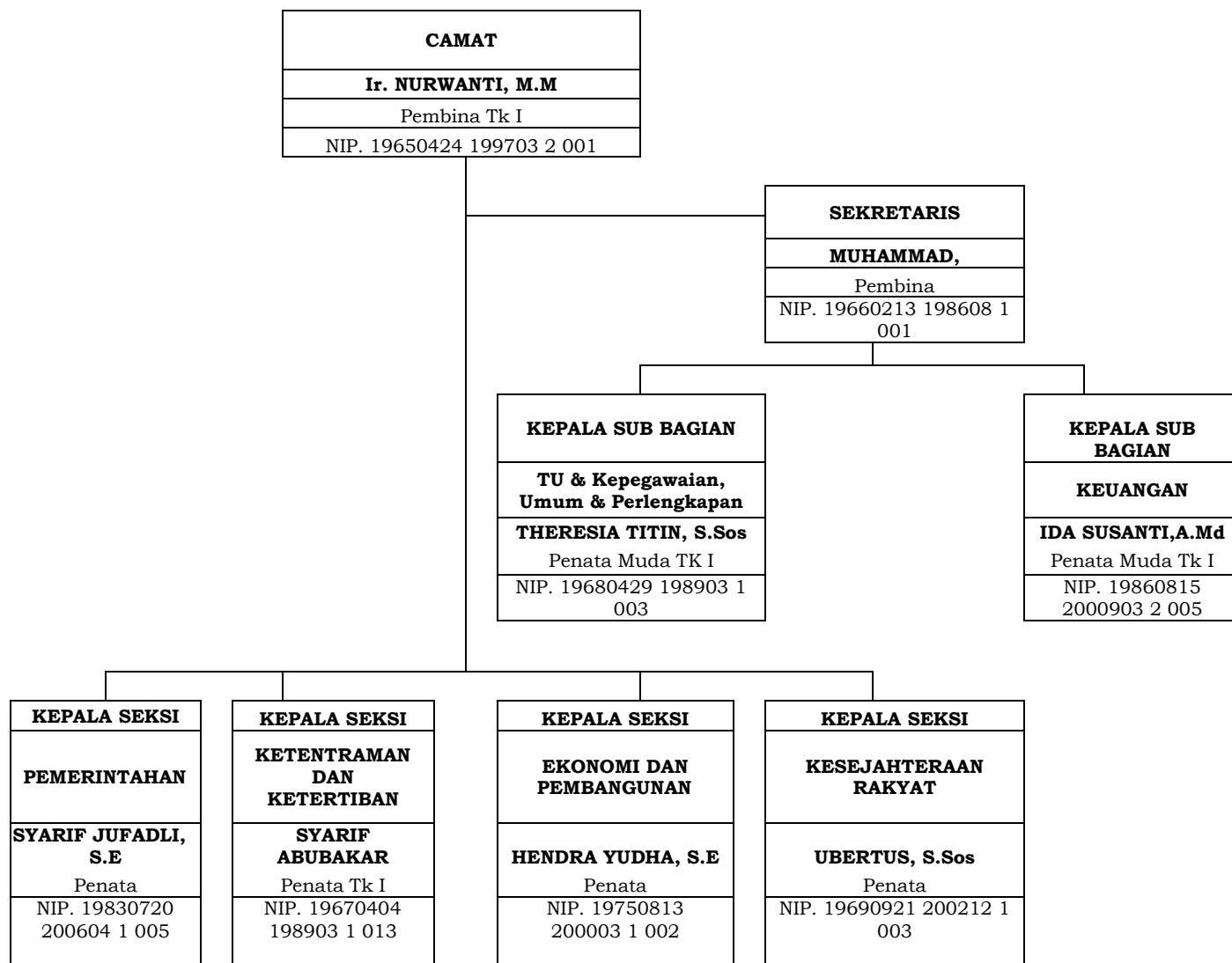


6. Pelaksanaan pelayanan sosial dan penanggulangan masalah sosial;
7. Penyiapan bahan pembinaan pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
8. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
9. Pelaksanaan fasilitasi di bidang keagamaan;
10. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat;
11. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan masyarakat; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Kemasyarakatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.



STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL KECAMATAN KUALA MANDOR B



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

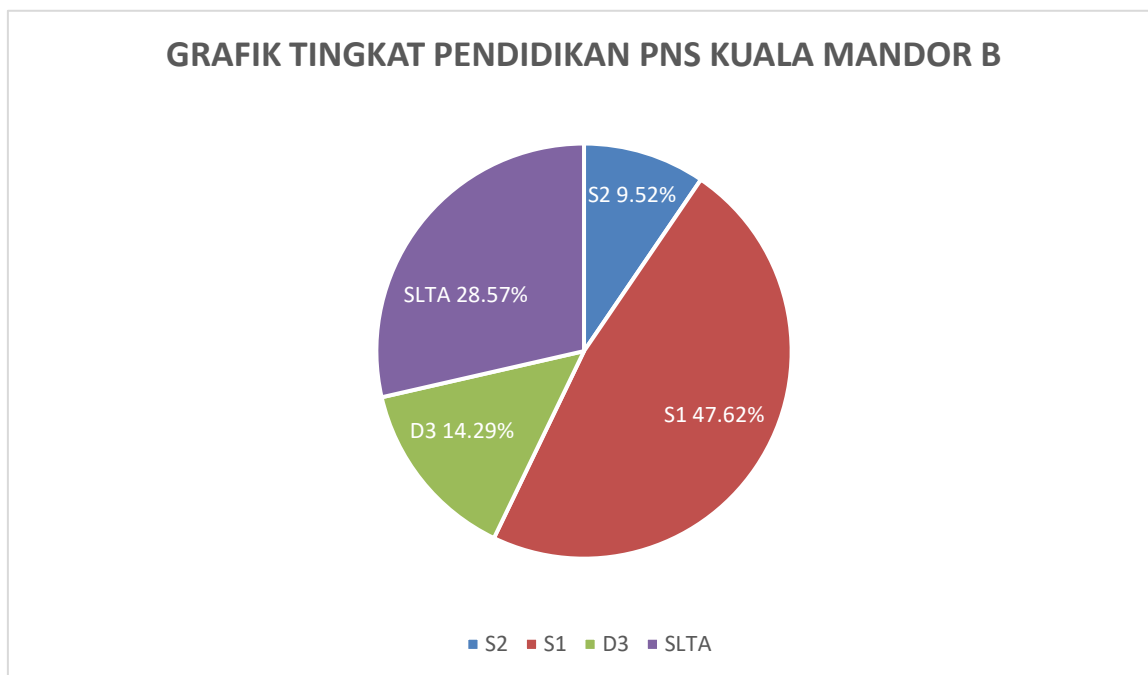
Tabel 2.1
KONDISI SUMBER DAYA APARATUR
KECAMATAN KUALA MANDOR B KAB. KUBU RAYA BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	2 orang	5
2.	S-1	10 orang	52
3.	Diploma	3 orang	14
4.	SMA	6 orang	29
Jumlah		21 orang	100

Sumber : DUK Kecamatan Kuala Mandor B Kab.Kubu Raya, 2022



Atau dapat digambarkan pada grafik seperti gambar berikut :



Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personil Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S2) 9,52%, Sarjana (S1) 47,62 %, Diploma 14,29%, dan SLTA 28,57%.

Untuk melihat kondisi sumber daya aparatur Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
KECAMATANKUALA MANDOR B
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (ORG)
(1)	(2)	(3)
1	Pembina Tk I (IV/a)	2
2	Penata Tk. I (III/d)	2
3	Penata (III/c)	5
4	Penata Muda Tk. I (III/b)	3
5	Penata Muda (III/a)	5
6	Pengatur Tk I (II/d)	1
7	Non PNS	3
TOTAL		21

Sumber : Daftar Urut Kependidikan Kecamatan Kuala Mandor B 2022



Berdasarkan Tabel 2.2. tersebut diketahui bahwa secara umum mayoritas sumber daya aparatur Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah berpangkat Pembina 2 orang, Penata 15 orang.

Selanjutnya sumber daya aparatur Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselon, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN KUALA MANDOR B
BERDASARKAN ESELON

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Eselon III/a	1	Camat
2	Eselon III/b	1	Sekcam
3	Eselon IV/a	4	Kepala Seksi
4	Eselon IV / b	2	Kepala Sub Bagian
5	Non Eselon*	10	Pelaksana
6	Non PNS	3	Honorar
Jumlah		21	-

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kantor Camat Kuala Mandor B, 2021

Berdasarkan Tabel 2.3. tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya, mulai Eselon IIIa sampai dengan Eselon IVb sudah terisi dengan didukung tenaga staf sebanyak 10 orang dengan latar belakang tingkat pendidikan yang bervariasi. Sampai saat ini Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga staf di masing masing seksi dan sekretariat, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Kecamatan Kuala Mandor B mempekerjakan staf non PNS sebanyak 3 orang.

Secara rinci Jumlah pegawai yang bertugas di Kecamatan Kuala Mandor B pada bulan Januari 2021 sampai dengan Desember tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.4



Tabel 2.4.
DUK BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN
KECAMATANKUALA MANDOR B

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUAN G	JABATAN	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MALUK, S.Pd 196602131986081001	Pembina (IV / a)	C A M A T	-
2.	MUHAMMAD, S.Sos 197304062006041006	Pembina (IV / a)	Sekretaris Kecamatan	
3.	SYARIF ABUBAKAR 196704041989031013	Penata Tk I (III / d)	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-
4.	HENDRA YUDHA, SE 197508132000031002	Penata Tk I (III / d)	Kasi Ekonomi Pembangunan	
5.	UBERTUS, S.Sos 197104091993032003	Penata (III / c)	Kasi Kesejahteraan Rakyat	-
6.	SYARIF JUFADLI, SE 198307202006041005	Penata (III / c)	Kasi Pemerintahan	-
7.	THERESIA TITIN, S.Sos 197606072010012006	Penata (III / c)	Kasubbag. Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum	-
8.	HENDRA, S.T 197703042002121007	Penata (III / c)	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	-
9.	AMIR, S. ST. PI 198004052009031002	Penata (III / c)	Pengelola Perekonomian Pembangunan Desa dan Lingkungan Hidup	
10.	SA'RANI 196411071989031012	Penata Muda Tk I (III / b)	Pengadministrasi Persuratan	
11.	IDAWANI 196909181996032006	Penata Muda Tk I (III / b)	Pengadministrasi Pemerintahan	
12.	WIDODO RUSNO PUTRO, SE 198611202010011003	Penata Muda Tk I (III / b)	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	-
13.	IDA SUSANTI, A.Md 198608152009032005	Penata Muda (III / a)	Kasubag Rencana Kerja & Keuangan	
14.	ANTONIA ALING, S.M 197512252010011002	Penata Muda (III / a)	Pengelola Kepegawaian	-



15.	<i>FERONIKA APRITA NIKI, A.Md 198604122010012007</i>	<i>Penata Muda (III/a)</i>	<i>Pengelola Barang Milik Negara</i>	-
16	<i>HAJAR YANTI, S.Sos 197801222017102001</i>	<i>Penata Muda (III/a)</i>	<i>Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	-
17	<i>MIRWAN HADI, S.Kom 198803062017101001</i>	<i>Penata Muda (III/a)</i>	<i>Pengelola Perekonomian Pembangunan Desa dan Lingkungan Hidup</i>	-
18	<i>PUTRI PERMALA DEWI, A.Md 199009172015012001</i>	<i>Pengatur Tk I (II/d)</i>	<i>Bendahara</i>	-

Sumber : Duk 2021

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Kuala Mandor B, 2020

Kondisi sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan Kuala Mandor B masih kurang memadai hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya kualitas dan tanggung jawab PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan masih terbatasnya jumlah PNS dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan pendidikan/pengetahuan dan ketrampilan, sehingga pelaksanaan tugas belum berjalan secara optimal serta masih terbatasnya kesempatan PNS untuk mengikuti berbagai diklat struktural, teknis dan fungsional, sehingga mempengaruhi kemampuan wawasan dan pemahaman dalam pelaksanaan tugas.

Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Kuala Mandor B sudah cukup memadai, dimana hampir setiap kebutuhan operasional sudah dapat dipenuhi dengan baik.

Adapun fasilitas pendukung Kecamatan Kuala Mandor B adalah sebagai berikut :



**TABEL 2.5.
SARANA PENDUKUNG PELAYANAN KECAMATAN KUALA MANDOR B**

NO	NAMA BARANG	KEADAAN BARANG			Tanpa Keterangan
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK	
1	Filling Besi	-	1	-	
2	Mesin Ketik Manual	-	-	3	
3	Sepeda Motor	5	-	1	
4	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11	-	-	
5	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	-	-	
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	-	-	
7	Komputer PC	6	-	-	
8	Unit Transceiver SSB Portable	1	-	-	
9	Mesin Absensi	-	-	2	
10	Kipas Angin	-	-	3	
11	Mesin Potong Rumput	-	-	2	
12	Bak Air	-	-	1	
13	Amplifier	-	-	1	
14	Televisi	-	-	-	
15	Sound System	2	-	-	
16	Spead Boat (Body)	1	-	1	
17	Printer	-	1	7	
18	Lap Top	7	-	10	
19	Note Book	7	-	2	
20	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (warna Coklat)	3	-	-	
21	Kursi Kerja pegawai (biru Rakuda)	6	-	10	
22	Lemari Arsip	2	-	-	
23	Kursi Ruang Tunggu	2	-	-	
24	Kursi Rapat bhn Besi (merah)	250	-	8	12
25	Kursi Rapat Plastik	50	-	-	



26	AC		9	-	-	
----	----	--	---	---	---	--

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Kuala Mandor B tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini ;



Tabel 2.6.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Kinerja Lainnya	Target Renstra Perubahan Perubahan Perubahan SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Tahun ke-					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	A/Sangat Baik		79,9 / baik	80,1 / baik	81 / baik	82 / baik	100 / sgt baik	100 / sgt baik	79,9 / baik	80,1 / baik	81 / baik	82 / baik	82 / baik	86 / baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah Desa yang Naik Tipe	-	5 Desa		1 Desa	1 Desa	2 Desa	3 Desa	4 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	na	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	na
3	Jumlah Usulan Masyarakat yang dilaksanakan dalam Musrenbang	-	45 Usulan		9 Usulan	9 Usulan	9 Usulan	9 Usulan	9 Usulan	9 Usulan	9 Usulan	9 Usulan	9 Usulan	9 Usulan	9 Usulan	9 Usulan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
3	Predikat (Nilai) LAKIP Kecamatan Kuala Mandor B *)	-	B		C	C	CC	CC	B	B	C	C	C	BB	BB	na	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Tabel 2.7.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA

NO	URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET RENSTRA PERUBAHAN PERUBAHAN SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian																	
	PROGRAM PEENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																	
	Sistem Informasi Perencanaan SKPD	7,500,000	8,490,000	9,339,000	10,272,900	11,300,190	7,500,000	8,490,000	9,339,000	9,759,255	10,735,181	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	8.54%	7.44%
	Penyelenggaraan Penyusunan Rencana strategis (Renstra Perubahan Perubahan)	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12,500,000	7,024,650	12,000,000	20,000,000	21,000,000	3,901,704	3,854,704	4,392,978	19,000,000	19,950,000	0.31	0.55	0.37	0.95	0.95	10.93%	38.59%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3,000,000	4,050,000	4,050,000	4,252,500	4,465,125	3,000,000	4,050,000	4,050,000	4,039,875	4,241,869	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	8.28%	7.17%
	Jasa Kebersihan Kantor	38,920,000	38,920,000	44,802,600	1,100,000	1,200,000	38,920,000	38,920,000	44,802,600	1,045,000	1,140,000	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	-50.13%	-50.64%
	Penyediaan alat Tulis Kantor	14,000,000	14,000,000	15,624,000	15,500,000	16,000,000	14,000,000	14,000,000	15,624,000	14,725,000	15,200,000	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	2.71%	1.66%
	Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan	8,000,000	8,567,000	9,837,000	10,328,850	10,845,293	8,000,000	8,567,000	9,837,000	9,812,408	10,303,028	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	6.27%	5.19%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,300,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,235,000	1,330,000	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	6.96%	5.87%



RENSTRA PERUBAHAN Kecamatan Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019- 2024

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,800,000	-	1,800,000	1,500,000	1,600,000	-	-	1,800,000	1,425,000	1,520,000	-	-	1.00	0.95	0.95	-2.33%	0.00%
Penyediaan makan dan Minum	8,000,000	6,000,000	12,000,000	6,900,000	7,200,000	8,000,000	6,000,000	12,000,000	6,555,000	6,840,000	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	-2.09%	-3.08%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	15,000,000	7,500,000	15,900,000	16,695,000	17,529,750	-	7,500,000	7,950,000	15,860,250	16,653,263	-	1.00	0.50	0.95	0.95	3.17%	0.00%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	25,000,000	29,550,000	43,520,000	45,696,000	47,980,800	24,780,000	29,500,000	43,070,000	43,411,200	45,581,760	0.99	1.00	0.99	0.95	0.95	13.93%	12.96%
Penyusunan Standar Operasional	10,000,000	-	5,000,000	5,250,000	5,512,500	4,681,925	-	5,000,000	4,987,500	5,236,875	0.47	-	1.00	0.95	0.95	-11.23%	2.27%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR																	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	12,600,000	43,577,000	15,000,000	15,000,000	-	12,600,000	43,575,000	14,250,000	14,250,000	-	1.00	1.00	0.95	0.95	0.00%	0.00%
Pengadaan peralatan gedung kantor	9,000,000	40,500,000	129,320,000	15,000,000	15,000,000	8,500,000	40,500,000	118,250,000	14,250,000	14,250,000	0.94	1.00	0.91	0.95	0.95	10.76%	10.89%
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas	7,125,000	4,000,000	8,520,000	800,000	800,000	7,124,000	4,000,000	8,520,000	760,000	760,000	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	-35.43%	-36.08%
Pemeliharaan rutin / berkala komputer	1,800,000	1,200,000	2,400,000	2,000,000	2,000,000	900,000	1,200,000	2,400,000	1,900,000	1,900,000	0.50	1.00	1.00	0.95	0.95	2.13%	16.12%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	11,520,000	-	11,000,000	-	8,000,000	6,800,000	-	9,350,000	-	7,600,000	0.59	-	0.85	-	0.95	-7.03%	2.25%
Pengadaan Pakaian Olahraga	3,250,000	-	-	-	8,000,000	3,520,000	-	-	-	7,600,000	1.08	-	-	-	0.95	19.74%	16.64%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																	
Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	5,000,000	5,000,000	6,000,000	6,300,000	6,615,000	1,999,900	1,999,900	5,658,888	5,985,000	6,284,250	0.40	0.40	0.94	0.95	0.95	5.76%	25.73%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	7,500,000	7,500,000	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,398,000	5,500,000	3,536,000	4,987,500	5,236,875	0.72	0.73	0.71	0.95	0.95	-5.97%	-0.60%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	10,000,000	10,000,000	3,966,000	4,164,300	4,372,515	5,000,000	8,901,000	3,264,000	3,956,085	4,153,889	0.50	0.89	0.82	0.95	0.95	-15.25%	-3.64%



RENSTRA PERUBAHAN Kecamatan Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019- 2024

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	20,000,000	11,527,000	9,000,000	9,450,000	9,922,500	19,497,950	10,291,000	9,000,000	8,977,500	9,426,375	0.97	0.89	1.00	0.95	0.95	-13.08%	-13.53%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	15,000,000	13,000,000	5,000,000	5,250,000	5,512,500	10,335,425	12,999,875	5,000,000	4,987,500	5,236,875	0.69	1.00	1.00	0.95	0.95	-18.14%	-12.71%
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN																	
Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan	-	24,500,000	-	-	-		24,499,700		-	-	-	1.00	-	-	-	0.00%	0.00%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD																	
Peningkatan Kapasitas pengelola Keuangan SKPD	20,000,000	27,210,000	35,080,000	36,834,000	38,675,700	14,540,000	23,510,000	3,430,000	34,992,300	36,741,915	0.73	0.86	0.10	0.95	0.95	14.10%	20.37%
Fasilitasi Penataan aset Pada SKPD	10,000,000	6,132,000	9,000,000	9,450,000	9,922,500	9,999,800	5,879,800	9,000,000	8,977,500	9,426,375	1.00	0.96	1.00	0.95	0.95	-0.16%	-1.17%
PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN																	
Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	-	10,000,000	13,250,000	13,912,500	14,608,125	-	9,909,700	13,250,000	13,216,875	13,877,719	-	0.99	1.00	0.95	0.95	0.00%	0.00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH																	
Peningkatan Kualitas pelayanan publik	-	5,804,500	5,000,000	5,250,000	5,512,500	-	2,804,500	3,570,000	4,987,500	5,236,875	-	0.48	0.71	0.95	0.95	0.00%	0.00%
PEMBERDAYAAN KECAMATAN																	
Pembinaan pemerintahan Desa	25,000,000	22,854,250	37,450,000	39,322,500	41,288,625	22,205,000	21,950,000	36,920,000	37,356,375	39,224,194	0.89	0.96	0.99	0.95	0.95	10.55%	12.05%
Pembinaan Sosial kemasyarakatan	25,000,000	22,933,625	37,450,000	39,322,500	41,288,625	21,146,500	21,389,500	36,920,000	37,356,375	39,224,194	0.85	0.93	0.99	0.95	0.95	10.55%	13.15%
pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan	25,000,000	22,999,625	37,450,000	39,322,500	41,288,625	20,952,500	19,326,500	36,920,000	37,356,375	39,224,194	0.84	0.84	0.99	0.95	0.95	10.55%	13.36%
Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban	27,500,000	24,820,000	37,450,000	39,322,500	41,288,625	23,707,275	22,627,275	37,223,000	37,356,375	39,224,194	0.86	0.91	0.99	0.95	0.95	8.47%	10.59%
Penataan kearsipan	14,000,000	14,000,000	18,531,000	19,457,550	20,430,428	12,049,975	13,393,975	16,899,999	18,484,673	19,408,906	0.86	0.96	0.91	0.95	0.95	7.85%	10.00%
Penyusunan profil kecamatan	14,000,000	7,000,075	15,185,000	15,944,250	16,741,463	13,147,850	6,369,925	15,185,000	15,147,038	15,904,389	0.94	0.91	1.00	0.95	0.95	3.64%	3.88%
Fasilitasi Pelayanan Kependudukan	10,000,000	10,000,000	10,707,000	11,242,350	11,804,468	9,938,325	9,938,550	10,515,000	10,680,233	11,214,244	0.99	0.99	0.98	0.95	0.95	3.37%	2.45%



*RENSTRA PERUBAHAN Kecamatan Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019- 2024*

Pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan tingkat kecamatan	25,000,000	25,000,000	31,062,000	32,615,100	34,245,855	24,999,825	24,999,825	30,978,000	30,984,345	32,533,562	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	6.50%	5.41%
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan perizinan	40,480,000	31,385,350	14,550,500	15,278,025	16,041,926	34,479,500	28,284,625	13,651,100	14,514,124	15,239,830	0.85	0.90	0.94	0.95	0.95	-16.90%	-15.07%
Fasilitasi Peningkatan Wawasan kebangsaan	20,000,000	20,000,000	62,771,000	65,909,550	69,205,028	18,049,900	19,375,900	61,139,000	62,614,073	65,744,776	0.90	0.97	0.97	0.95	0.95	28.18%	29.50%
terfasilitasinya pemberdayaan keluarga sejahtera	21,500,000	23,000,000	23,541,000	24,718,050	25,953,953	19,610,900	20,710,900	21,886,000	23,482,148	24,656,255	0.91	0.90	0.93	0.95	0.95	3.84%	4.69%
terfasilitasinya pembinaan posyandu	3,000,000	3,000,000	-	-	-	2,280,000	2,559,000	-	-	-	0.76	0.85	-	-	-	-100.00%	-100.00%
terfasilitasinya pembinaan monografi	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
meningkatkan peran dan tugas RT/RW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
terfasilitasinya tapal batas antas desa	7,000,000	7,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	6,535,500	6,264,750	8,580,000	10,473,750	10,997,438	0.93	0.89	0.82	0.95	0.95	10.58%	10.97%
terfasilitasinya penyusunan indeks kepuasan masyarakat	10,000,000	-	-	-	-	2,550,000	-	-	-	-	0.26	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%



*RENSTRA PERUBAHAN Kecamatan Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019- 2024*



Seperti yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa kondisi atau gambaran pengelolaan keuangan di Kecamatan Kuala Mandor B melalui mekanisme yang ada sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mempunyai keterkaitan hubungan yang erat dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas namun memiliki kewenangan yang terbatas sehingga dalam upaya memberikan pembinaan dan pelayanan yang optimal (*Faster, Better, and Cheaper*) kepada masyarakat tidak dapat memenuhi target/sasaran yang diinginkan.

Adapun bentuk pelayanan masa kini antara lain :

1. Urusan Kependudukan

Untuk jenis pelayanan publik pada Kecamatan Kuala Mandor B cukup baik meskipun tidak dapat dipungkiri masih terdapat banyak kekurangan pada pelayanan tersebut seperti lamanya pembuatan surat menyurat. Kemudian masalah lain yang menjadi salah satu faktor menurunnya kinerja pelayanan yakni ketersediaan sarana dan prasarana yang kadang-kadang masih mengalami ketidaktersediaan pada waktu pelayanan. Selain itu masalah kinerja personil juga ikut mempengaruhi menurunnya kinerja pelayanan yang mana pada saat ini personil yang memiliki keahlian, kemampuan masih sangat rendah terbukti dengan hanya satu orang didalam SKPD yang dapat mengoperasikan sistem kependudukan. Adapun bentuk pelayanan di Seksi Pemerintahan seperti yang tertera di bawah ini :

- a. Pembuatan KTP
- b. Pembuatan Kartu Keluarga



- c. Pembuatan Surat Pindah
- d. Penyusunan Profil Kecamatan
- e. Pembinaan Alokasi Dana Desa
- f. Peningkatan Tugas dan Fungsi RT/RW
- g. Penyelesaian Tapal Batas antar desa
- h. Pengurusan Administrasi Pernikahan

2. Urusan Pembangunan

Pada urusan pembangunan pelayanan yang ditunjukkan sudah cukup baik, terbukti dengan pembuatan surat menyurat yang masih dapat ditolerir :

- a. Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan
- b. Pembuatan Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
- c. Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha
- d. Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan

3. Urusan Kesejahteraan Rakyat

Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat pelayanan yang ditunjukkan juga sudah cukup baik, hal ini terbukti dengan terselesainya kegiatan-kegiatan pada seksi tersebut. Adapun bentuk pelayanan yang telah dilaksanakan seperti :

- a. Pembuatan surat keterangan nikah, ahli waris
- b. Pembuatan surat keterangan yang sifatnya bantuan sosial, raskin
- c. Pemberdayaan keluarga sejahtera khususnya masyarakat miskin
- d. Fasilitasi kegiatan yang bersifat sosial

4. Urusan Kesekretariatan



Untuk urusan di sekretariat pada umumnya bentuk pelayanan sudah berjalan cukup baik, kegiatan yang dilaksanakan ada kaitannya dengan administrasi kantor seperti surat menyurat, kepegawaian, laporan keuangan dan aset kantor.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kuala Mandor B baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT sebagai berikut :

Analisis Kekuatan (Strenght)

Dikaji dari analisis kekuatan (Strenght) bahwa terdapat kerjasama yang baik, sikap toleransi dan harmonisasi serta semangat pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Analisis Kelemahan (Weakness)

Dari sudut analisis kelemahan (weakness) bahwa sumber daya aparatur, anggaran dan sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendukung pemenuhan sumber daya aparatur, anggaran dan sarana prasarana kerja secara optimal dengan kebutuhan hingga pada akhirnya dapat terlaksana pelayanan secara optimal.



Analisis Peluang (Oppurtunity)

Dipandang dari sudut analisis peluang (opportunity) bahwa Kecamatan Kuala Mandor B memiliki peluang yang besar di sektor perkebunan dan pertanian di masa yang akan datang dengan didukung berbagai potensi yang dimiliki.

Analisis Hambatan (Threat)

Analisis hambatan (threat) dari Kecamatan Kuala Mandor B yaitu masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Kuala Mandor B masih berada di bawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah tingkat kesehatan rendah, infrastruktur kurang memadai sehingga dalam pelaksanaan kegiatan/program seperti pembinaan dan koordinasi masih mengalami hambatan akibatnya pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat terlaksana secara optimal.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi, Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kuala Mandor B adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang kurang memadai

Bila dilihat dari rasio tingkat pendidikan, Kecamatan Kuala Mandor B tergolong SKPD yang lemah, hal ini dapat dilihat dari 52,9% PNS yang ada ditempati oleh lulusan SMA/Sederajat. Demikian pula dengan PNS yang menempati jabatan, dari 8 Jabatan Eselon yang ada, 4 diantaranya ditempati oleh PNS lulusan SMA/Sederajat.

Rendahnya sumberdaya aparatur yang dimiliki jelas menimbulkan permasalahan dalam pelayanan diantaranya :

- Kurangnya pemahaman tentang tupoksi masing-masing.
- Rendahnya pemahaman tentang peraturan perundangan.
- Ketidapkahaman penggunaan IT.

2. Rendahnya Loyalitas

Rendahnya loyalitas sebagian PNS Kecamatan Kuala Mandor B dapat dilihat dari :

- Jam kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan
- Pelimpahan volume kerja sehingga menyebabkan terjadinya *overlapping* pekerjaan dan penumpukan volume kerja di sebagian PNS lain.

3. Sarana dan Prasarana yang belum memadai

Dalam menjalankan tugas sarana dan prasarana merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kinerja aparatur, karena kedua hal



tersebut adalah faktor yang wajib dan sangat dibutuhkan oleh aparatur dalam menjalankan tugas. Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat berakibat kepada menurunnya kualitas kinerja aparatur itu sendiri.

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, telah dilakukan upaya-upaya penanganan antara lain :

1. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan-kegiatan pendidikan serta bimbingan teknis adalah salah satu cara yang diupayakan sehingga kemampuan skill dari aparatur dapat dicapai.
2. Selain itu diberikan pengarahan oleh *top management* mengenai loyalitas kerja yang diamanatkan oleh undang-undang dan diberlakukan *reward* dan *punishment* bagi setiap aparatur tanpa terkecuali.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana juga menjadi salah satu cara yang dilaksanakan agar dapat menunjang kinerja SKPD. Keberadaan sarana dan prasarana yang baik menjadi salah satu faktor penunjang terciptanya pola kerja yang baik.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi Bupati Kubu Raya adalah “**Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Bahagia, Bermatabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius**”, dengan misi yang mendukung terwujudnya visi tersebut adalah sebagai berikut :



*RENSTRA PERUBAHAN Kecamatan Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024*

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat
3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal
4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat
5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

Dengan melihat visi dan misi Bupati Kubu Raya, maka Kantor Camat Kuala Mandor B melaksanakan tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Kubu Raya antara lain :

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP).
2. Melakukan penyusunan dan dan pelaporan kinerja SKPD.
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum di lingkungan SKPD.
4. Mengikutsertakan aparatur dalam diklat dan bimtek.

3.3 Telaahan Renstra Perubahan K/L dan Renstra Perubahan SKPD

Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu,



dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan program dan kegiatan yang disusun oleh Kecamatan Kuala Mandor B masih terdapat kendala terkait dinamika lingkungan strategis, yaitu :

1. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
2. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia perencana pembangunan di daerah.
3. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, adapun struktur tata ruang terbagi menjadi 3 (tiga) sitem yaitu :

1. Sistem Pusat Pusat kajian
2. Sitem Jaringan Prasarana Utama



3. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Berdasarkan struktur ruang untuk kecamatan yang ada di kabupaten kubu raya bahwa kecamatan termasuk dalam struktur ruang Sistem Pusat Pusat Kajian yang meliputi; Pusat kajian Nasional (PKN), Pusat kajian Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat pelayanan Lingkungan (PPL). Untuk lebih rincinya pembangian kegiatan di kecamatan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi, meliputi kawasan metropolitan Pontianak yang mencakup kawasan perkotaan Sungai Raya dan Kuala Mandor B (Pasal 14 dan 16 PP Nomor 26/2008)
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, meliputi Kecamatan Sungai Kakap, Kuala Mandor B, Kubu dan Batu Ampar (Pasal 14 dan 16 PP Nomor 26/2008)
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi Padang Tikar Dua (Kec. Batu Ampar), Terentang Hilir (Kec. Terentang), Selat Remis (Kec. Teluk Pakedai) dan Kuala Mandor B (Kec. Kuala Mandor B)
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kecamatan Kuala Mandor B mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan



sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical succes factors*).

Isu-isu Strategis Lingkungan Internal

Isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan internal SKPD Kantor Kuala Mandor B terbagi atas berbagai bidang antara lain :

- Bidang Sumber Daya Aparatur

Dengan sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan Kuala Mandor B masih kurang memadai hal ini dipengaruhi oleh kurangnya personil untuk mengisi jabatan staf disetiap seksi sesuai tupoksi dan volume pekerjaan serta terbatasnya kualitas dan tanggung jawab PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, oleh sebab itu dibutuhkan penambahan personil dan perlu mengikut sertakan aparat untuk mengikuti berbagai Pendidikan dan Latihan, Bimbingan Teknis, Kursus, Seminar dan lain-lain guna peningkatan pengetahuan, kemampuan dan kompetensi, perlu adanya rekrutmen PNS oleh Pemerintah Daerah hendaknya dilakukan secara selektif dan obyektif dan memperhatikan aspek pendidikan dan keahlian sesuai yang dibutuhkan, perlu adanya penerapan reward and punishment kepada PNS secara seimbang serta selalu melakukan supervise terhadap PNS setiap bulan untuk perbaikan kinerja.

- Bidang Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasaran kerja yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Kuala Mandor B masih kurang memadai untuk itu perlu adanya memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana kerja yang tersedia secara efisien dan efektif guna memberikan pelayanan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta memprogramkan pengadaan sarana dan prasarana kerja dalam APBD sesuai skala prioritas yang dibutuhkan oleh setiap



instansi guna meningkatkan kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

- Bidang Anggaran

Masih terbatasnya dukungan alokasi penganggaran untuk belanja langsung (program/kegiatan) sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran kas Kecamatan, sehingga pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan secara optimal, masih terbatasnya dukungan alokasi penganggaran untuk belanja tidak langsung (insentif PNS) dalam anggaran kas Kecamatan, sehingga mempengaruhi motivasi dan etos kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta minimnya dukungan sharing pembiayaan baik dari Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan dan desentralisasi, sehingga mempengaruhi optimalisasi tugas yang dilaksanakan. Dengan keterbatasan penganggaran yang dimiliki seperti yang tersebut diatas oleh sebab itu perlu adanya dukungan dalam mengalokasikan anggaran baik untuk kebutuhan belanja langsung maupun belanja tidak langsung secara proporsional dan sesuai kebutuhan riil berdasarkan standar harga dan standar pelayanan prima dan dapat mengalokasikan sharing pembiayaan yang seimbang terhadap pelaksanaan program/kegiatan di wilayah Kecamatan/Desa yang menjadi kewenangan Propinsi dan Kabupaten.

Isu-Isu Strategis Lingkungan Eksternal

Isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan eksternal SKPD Kantor Camat Kuala Mandor B antara lain :

- Keadaan Wilayah

Keadaan wilayah/medan Kecamatan Kuala Mandor B terdiri atas dataran dan sungai. Dengan keadaan wilayah yang cukup luas, maka perlu adanya upaya perbaikan atau peningkatan sarana dan prasarana transportasi



seperti jembatan, jalan, kendaraan, sehingga memudahkan atau mempercepat waktu, biaya antar desa yang ada.

- **Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Tingkat Pendidikan masyarakat di wilayah Kecamatan Kuala Mandor B masih tergolong rendah, hal ini disebabkan antara lain oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang pendidikan tingkat menengah pertama dan atas, masih terbatas dan belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar terutama di wilayah terpencil dan pedalaman, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan atau masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia khususnya di Kecamatan Kuala Mandor B. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang pendidikan tingkat menengah pertama dan atas, peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui diklat, kursus, dan bimbingan teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing, serta penambahan jumlah tenaga pengajar yang dibutuhkan sesuai dengan pendidikan/pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan masyarakat di Kecamatan Kuala Mandor B.

- **Tingkat Perekonomian Masyarakat**

Tingkat Perekonomian masyarakat di Kecamatan Kuala Mandor B masih tergolong rendah, hal ini disebabkan antara lain masih terbatasnya alternatif lapangan usaha, kurangnya dukungan modal usaha dan pembinaan, terbatasnya akses pemasaran, masih rendahnya semangat bekerja/berwirausaha dari masyarakat, sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya lowongan lapangan usaha/pekerjaan, dukungan terhadap modal usaha dan peningkatan frekwensi pembinaan kepada pencari kerja, jalur pemasaran



produksi, dan pembinaan peningkatan semangat kerja/wirausaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kuala Mandor B.

- Keadaan Infrastruktur

Keadaan infrastruktur di wilayah Kecamatan Kuala Mandor B, seperti jalan, jembatan, air dan telekomunikasi belum memadai terutama di wilayah Desa Terpencil, yang berada pada jalur sungai sehingga mempengaruhi perkembangan tingkat perekonomian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat serta aspek-aspeknya lainnya. Perlu adanya dukungan pembenahan, perbaikan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air dan telekomunikasi untuk wilayah yang tersebut di atas sehingga dapat meningkatkan perekonomian, pendidikan, derajat kesehatan serta aspek-aspek lain bagi masyarakat.

- Tingkat Kesehatan Masyarakat

Tingkat kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Kuala Mandor B masih relatif rendah, antara lain disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Polindes dan Pustu, masih kurangnya tenaga paramedis terutama di wilayah desa terpencil/pedalaman, luasnya jangkauan wilayah binaan, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini, sehingga berdampak terhadap perkembangan tingkat kesehatan masyarakat. Perlu adanya penambahan tenaga paramedis di daerah terpencil/pedalaman yang disebabkan karena luasnya jangkauan desa binaan sehingga dapat memberikan motivasi kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi dan memeriksakan kesehatan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat

- Tingkat Pendelegasian Wewenang

Di Wilayah Kecamatan Kuala Mandor B terdapat beberapa Instansi Pemerintahan, seperti Kantor Camat, Polsek, Koramil, UPT. Puskesmas,



*RENSTRA PERUBAHAN Kecamatan Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024*

Kantor Urusan Agama (KUA), Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan Kecamatan (BP3K) namun masih memiliki kewenangan yang terbatas dalam upaya memberikan pembinaan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Perlu adanya pendelegasian wewenang yang lebih besar dan tegas kepada instansi pemerintahan di kecamatan seperti Kantor Camat, UPT. Pendidikan, BP3K, KUA, Polsek dan Kormail sehingga dapat mempercepat/meningkatkan pelayanan dan pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi.

- Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan

Batas wilayah administrasi pemerintahan di Kecamatan Kuala Mandor B baik antar desa, antar kecamatan dan antar Kabupaten sampai saat masih menjadi hambatan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kependudukan, dan pelaksanaan perizinan pembangunan baik di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya, sehingga mempengaruhi percepatan pelayanan dan investasi. Perlu adanya penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan secara bertahap/berjenjang antar desa, kecamatan dan kabupaten, sehingga dapat memberikan kepastian dalam pelayanan dan percepatan rencana investasi pembangunan di wilayah khususnya dan kabupaten pada umumnya.

- Tingkat Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Di samping berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Kakap masih perlu mendapat perhatian dan pembinaan baik di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, perizinan (seperti IMB, SITU, SIUP, dan UUG), perencanaan, perpajakan dan retribusi seperti PBB, PPN, PPh, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan lain-lain, sehingga mempengaruhi target dan realisasi dari pencapaian sasaran program/kegiatan dan pendapatan daerah. Perlu diintensifkan sosialisasi, penyuluhan dan



*RENSTRA PERUBAHAN Kecamatan Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024*

pembinaan di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, hukum, perizinan, perpajakan, dan perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan motivasi, peran aktif dan kesadaran masyarakat sehingga tercapai tujuan dan sasaran pelaksanaan program sesuai harapan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mendukung pencapaian visi, misi dimaksud maka harus ditetapkan lebih lanjut tentang tujuan yang akan dicapai. Tujuan dalam perumusan rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Hasil akhir dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan antara lain :

1. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sejalan dengan kebijakan pemerintah, dan menjelaskan visi dan misi organisasi;
2. Tujuan yang tercapai merupakan pelaksanaan misi;
3. Merupakan jawaban atas permasalahan dalam kajian lingkungan internal/eksternal;
4. Tujuan tidak akan mengalami perubahan yang bermakna kecuali perubahan yang sangat signifikan;
5. Menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan saat ini dan akan datang;
6. Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai organisasi;
7. Menunjukkan secara jelas arah lembaga dan program-programnya namun tidak spesifik;
8. Harus menantang tapi realistis dan dapat dicapai.

Selanjutnya Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan sasaran mengandung makna sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih



spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulan).

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi antara lain :

1. Spesifik;
2. Dapat dinilai dan terukur;
3. Menantang namun dapat dicapai;
4. Berorientasi pada hasil;
5. Dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pada kriteria yang telah dikemukakan di dalam tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perubahan SKPD Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :



**Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kuala Mandor B**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00 / Sangat Baik	81,35 / Sangat Baik	81,37 / Sangat Baik	82,00 / Sangat Baik	83,00 / Sangat Baik	84,00 / Sangat Baik
2	Meningkatnya kemandirian Desa	Jumlah Desa yang Berstatus Mandiri	Meningkatnya Status Desa	2 Jumlah Desa yang naik kategori	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	2 Desa
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1 Predikat (Nilai) LAKIP Kecamatan Kuala Mandor B	70,32 / BB	72,66 / BB	74,31 / BB	76,26 / BB	78,00 / BB	80,00 / A



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Kecamatan Kuala Mandor B tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Kuala Mandor B melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.



*RENSTRA PERUBAHAN PERUBAHAN Kecamatan Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024*

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas, perlu ditetapkan strategi lebih lanjut. Adapun strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Kuala Mandor B antara lain :



**Tabel 5.1.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

VISI	:	TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS				
MISI 1	:	Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good Governance)				
MISI 3	:	Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal				
Sasaran Strategis di RPJMD	:	S2 Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat				
Sasaran Strategis di RPJMD	:	S27 Meningkatnya Status Desa				
Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Nilai SKM Sesuai Target	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Memaksimalkan Penerapan Standar Pelayanan	Evaluasi Berkala Terhadap Penerapan Maklumat Pelayanan	
					peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan Publik	Peningkatan Penguasaan IT Aparatur
					Penguatan Kapasitas Terkait Regulasi	
	Nilai Sakip	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Mewujudkan Tercapainya Target IKU	menyiapkan dokumen yang diperlukan	
Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	Peningkatan fungsi controlling Perencanaan Pembangunan Desa	Optimalisasi Verifikasi dan Sinkronisasi Pembangunan Desa Oleh Daerah	



					Peningkatan Kapasitas Desa dalam Korespondensi Data Pembangunan Desa	Peningkatan Pembinaan ke desa khususnya Korespondensi data
--	--	--	--	--	--	--



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan-kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi. Untuk menjabarkan beberapa program perlu ditetapkan beberapa kegiatan pokok.

Adapun program dan kegiatan pokok yang telah dan akan dilaksanakan 2019 diprioritaskan pada usaha untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka ditetapkan program dan kegiatan dalam Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2020-2025 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKDP
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Meubelair
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan Non Usaha
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Nonperijinan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN



- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan



**Tabel 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN KECAMATAN KUALA MANDOR B
KABUPATEN KUBU RAYA**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Tahun-6 (2024)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Akhir					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1, Meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat 2. Meningkatkan kemandirian Desa	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Jumlah Desa yang Berstatus Mandiri	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	268.995.900	100%	308.780.400	100%	339.658.440	100%	373.624.284	100%	410.986.712	100%	452.085.384	100%	2.154.131.120	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR		
		01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 Bulan	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
		01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	24.000.000	12 Bulan	26.400.000	12 Bulan	29.040.000	12 Bulan	31.944.000	12 Bulan	35.138.400	12 Bulan	164.522.400	72 Bulan	164.522.400	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
		01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	-	9 Unit	-	9 Unit	-	9 Unit	-	9 Unit	-	9 Unit	-	9 Unit	-	9 Unit	-	9 Unit	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
		01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	6.082.500	12 Bulan	3.682.500	12 Bulan	4.050.750	12 Bulan	4.455.825	12 Bulan	4.901.408	12 Bulan	5.391.548	12 Bulan	28.564.531	72 Bulan	28.564.531	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
		01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	77.163.500	12 Bulan	77.747.500	12 Bulan	85.522.250	12 Bulan	94.074.475	12 Bulan	103.481.923	12 Bulan	113.830.115	12 Bulan	551.819.762	72 Bulan	551.819.762	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
		01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	22.047.900	12 Bulan	20.344.400	12 Bulan	22.378.840	12 Bulan	24.616.724	12 Bulan	27.078.396	12 Bulan	29.786.236	12 Bulan	146.252.496	72 Bulan	146.252.496	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
		01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	9.802.000	12 Bulan	12.906.000	12 Bulan	14.196.600	12 Bulan	15.616.260	12 Bulan	17.177.886	12 Bulan	18.895.675	12 Bulan	88.594.421	72 Bulan	88.594.421	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
		01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	38.000.000	12 Bulan	41.800.000	12 Bulan	45.980.000	12 Bulan	50.578.000	12 Bulan	55.635.800	12 Bulan	234.993.800	72 Bulan	234.993.800	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR



RENSTRA PERUBAHAN PERUBAHAN Kecamatan Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

	01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	1.800.000	12 Bulan	1.800.000	12 Bulan	1.980.000	12 Bulan	2.178.000	12 Bulan	2.395.800	12 Bulan	2.635.380	72 Bulan	12.789.180	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR		
	01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pembayaran penyediaan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat pegawai	12 kali	12 kali	19.500.000	12 kali	15.600.000	12 kali	17.160.000	12 kali	18.876.000	12 kali	20.763.600	12 kali	22.839.960	72 kali	114.739.560	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR		
	01.17	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2 Orang	2 Orang	25.200.000	2 Orang	19.300.000	2 Orang	21.230.000	2 Orang	23.353.000	2 Orang	25.688.300	2 Orang	28.257.130	12 Orang	143.028.430	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR		
	01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	72 bulan	12 bulan	86.400.000	12 bulan	95.400.000	12 bulan	104.940.000	12 bulan	115.434.000	12 bulan	126.977.400	12 bulan	139.675.140	72 Orang	668.826.540	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR		
	01.23	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen (SOP) SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR		
	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			154.500.000	100%	192.203.500	100%	211.423.850	100%	232.566.235	100%	255.822.859	100%	255.822.859	100%	1.302.339.302	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR		
	02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan Sepeda Motor	-	-	-	4 Unit	90.000.000	-	-	2 unit	-	-	-	-	-	6 Unit	90.000.000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR		
	02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	123.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	44.000.000	1 Paket	48.400.000	1 Paket	53.240.000	1 Paket	53.240.000	6 Paket	361.880.000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR		
	02.09	Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	123.000.000	1 Paket	40.875.000	1 Paket	44.962.500	1 Paket	49.458.750	1 Paket	54.404.625	1 Paket	54.404.625	6 Paket	367.105.500	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR		
	02.09	Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan Meubelair Kantor	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	6 Paket	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR		
	02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 Unit	3 Unit	11.100.000	9 Unit	-	9 Unit	-	9 Unit	-	9 Unit	-	9 Unit	-	54 Unit	11.100.000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR		
	02.30	Pemeliharaan rutin gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor	0	1 paket	2.400.000	1 paket	18.628.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	-	2 paket	21.028.500	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
	02.30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala komputer	3 Unit	3 Unit	2.400.000	3 Unit	2.700.000	5 Unit	2.970.000	5 Unit	3.267.000	5 Unit	3.593.700	5 Unit	3.593.700	26 Unit	18.524.400	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR		
	01.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	21.000.000			100%				100%				100%	21.000.000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR		
	01.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	20 Setel	22 Setel	21.000.000	-	-	22 Setel	21.000.000	22 Setel	23.100.000	22 Setel	25.410.000	22 Setel	25.410.000	62 Setel	115.920.000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR		
	01.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik Tradisional	-	22 Setel	21.000.000	-	-	22 Setel	21.000.000	22 Setel	23.100.000	22 Setel	25.410.000	22 Setel	25.410.000	66 Setel	115.920.000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR		
	01.06	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	20 Setel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR		



RENSTRA PERUBAHAN PERUBAHAN Kecamatan Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

																			Mandor B	
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	10.850.000	100%	67.250.000	100%	73.975.000	100%	81.372.500	100%	89.509.750	100%	89.509.750	100%	412.467.000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
05.07	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Jumlah dokumen Evaluasi Jabatan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	6 Dokumen	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
05.10	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	Jumlah dokumen Analisis Jabatan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	6 Dokumen	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
05.10	Bintek Peraturan perundang undangan	Jumlah peserta Bintek	2 org		9.000.000	5 org	67.250.000	5 org	73.975.000	5 org	81.372.500	5 org	89.509.750	5 org	89.509.750	30 orang	410.617.000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
15.	Program optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	tersedianya web kecamatan	100%	100%	-	100%	15.000.000	100%	16.500.000	100%	18.150.000	100%	19.965.000	100%	19.965.000	100%	89.580.000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
15.01	Pembuatan Website	Jumlah web di kecamatan	6 web	1 web	-	1 web	15.000.000	1 web	16.500.000	1 web	18.150.000	1 web	19.965.000	1 web	19.965.000	6 web	89.580.000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Event Seni dan Budaya	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	16.250.000	1 Kegiatan	17.875.000	1 Kegiatan	19.662.500	1 Kegiatan	21.628.750	1 Kegiatan	21.628.750	6 Kegiatan	97.045.000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	even/ kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	16.250.000	1 Kegiatan	17.875.000	1 Kegiatan	19.662.500	1 Kegiatan	21.628.750	1 Kegiatan	21.628.750	6 Kegiatan	97.045.000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
15.07	Pagelaran Adat Budaya Daerah	even/ kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	3 Kegiatan	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
16.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		100%	26.960.000	100%	16.250.000	100%	17.875.000	100%	19.662.500	100%	21.628.750	100%	21.628.750	100%	124.005.000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
16.12	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Even/ kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	-	1 kegiatan	26.960.000	1 kegiatan	16.250.000	1 kegiatan	17.875.000	1 kegiatan	19.662.500	1 kegiatan	21.628.750	1 kegiatan	21.628.750	6 kegiatan	124.005.000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
20.18	Penyelenggaraan Open Turnamen Sepakbola Bupati Cup	Terselenggaranya kegiatan Turnamen Bupati Cup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
22.	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase Penurunan Titik Hotspot Dalam Setahun	100%	100%	11.360.000	100%	3.580.500	1	3.938.550	100%	4.332.405	100%	4.765.646	100%	4.765.646	100%	32.742.746	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
22.03	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan	Jumlah Sosialisasi kebijakan kebakaran hutan	-	1 Kegiatan	11.360.000	1 Kegiatan	3.580.500	1 Kegiatan	3.938.550	1 Kegiatan	4.332.405	1 Kegiatan	4.765.646	1 Kegiatan	4.765.646	6 Kegiatan	32.742.746	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
33.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Desa		100%	11.037.500	100%	6.507.200	100%	7.157.920	100%	7.873.712	100%	8.661.083	100%	8.661.083	100%	49.898.498	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	



RENSTRA PERUBAHAN PERUBAHAN Kecamatan Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

	33.26	Penyusunan Database E-Formasi	dokumendatabase E-Formasi	-	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	6 dokumen	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
	33.27	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	dokumenStandar Kompetensi Jabatan SKPD	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	6 dokumen	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
	33.29	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah pelaksanaan kualitas peningkatan pelayanan publik	-	12 bulan	5.265.000	12 bulan	1.782.100	12 bulan	1.960.310	12 bulan	2.156.341	12 bulan	2.371.975	12 bulan	2.371.975	72 bulan	15.907.701	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
	33.32	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	DokumenSurvey KepuasanMasyarakat (SKM)	-	1 Dokumen	5.772.500	1 Dokumen	4.725.100	1 Dokumen	5.197.610	1 Dokumen	5.717.371	1 Dokumen	6.289.108	1 Dokumen	6.289.108	6 Dokumen	33.990.797	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
	33.33	Penyusunan Standar Pelayanan	Dokumen Standar Pelayanan SKPD	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	6 Dokumen	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
	38.	Program Pemberdayaan Kecamatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kecamatan	100%	100%	370.905.000	100%	219.599.200	100%	241.559.120	100%	265.715.032	100%	292.286.535	100%	321.515.189	100%	1.711.580.076	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
	38.01	Pembinaan Pemerintah Desa	Jumlah desa yang diberikan pembinaan pemerintahan desa	6 Desa	6 Desa	47.419.800	6 Desa	30.398.800	6 Desa	33.438.680	6 Desa	36.782.548	6 Desa	40.460.803	6 Desa	40.460.803	6 Desa	228.961.434	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
	38.02	Pembinaan Sosial Kearsyarakatan	Jumlah desa yang diberikan pembinaan sosial	6 Desa	6 Desa	47.419.800	6 Desa	30.398.800	6 Desa	33.438.680	6 Desa	36.782.548	6 Desa	40.460.803	6 Desa	40.460.803	6 Desa	228.961.434	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
	38.03	Pembinaan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah desa yang diberikan pembinaan dan koordinasi	6 Desa	6 Desa	45.919.800	6 Desa	30.398.800	6 Desa	33.438.680	6 Desa	36.782.548	6 Desa	40.460.803	6 Desa	40.460.803	6 Desa	227.461.434	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
	38.04	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah desa yang diberikan pembinaan ketentraman dan ketertiban	6 Desa	5 Desa	46.019.800	5 Desa	28.998.800	6 Desa	31.898.680	6 Desa	35.088.548	6 Desa	38.597.403	6 Desa	38.597.403	6 Desa	219.200.634	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
	38.05	Penataan Kearsipan	Jumlah pelaksanaan penataan kearsipan sesuai persinya	12 bulan	12 bulan	19.966.550	-	-	12 bulan	-	-	12 bulan	-	12 bulan	-	72 bulan	19.966.550	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
	38.06	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumenProfil Kecamatan Kuala Mandor B	1 Dokumen	1 Dokumen	16.020.000	1 Dokumen	4.686.800	1 Dokumen	5.155.480	1 Dokumen	5.671.028	1 Dokumen	6.238.131	1 Dokumen	6.238.131	6 Dokumen	44.009.570	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
	38.08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Jumlah fasilitasi peningkatan pelayanan kependudukan	5 Desa	5 Desa	2.360.000	5 Desa	1.715.900	6 Desa	1.887.490	6 Desa	2.076.239	6 Desa	2.283.863	6 Desa	2.283.863	6 Desa	12.607.355	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
	38.09	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan tingkat Kecamatan	5 Desa	5 Desa	32.449.400	6 Desa	16.291.600	6 Desa	17.920.760	6 Desa	19.712.836	6 Desa	21.684.120	6 Desa	21.684.120	6 Desa	129.742.835	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
	38.10	Fasilitasi dan pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	6 Desa	6 Desa	12.480.000	6 Desa	7.752.300	6 Desa	8.527.530	6 Desa	9.380.283	6 Desa	10.318.311	6 Desa	10.318.311	6 Desa	58.776.736	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
	38.11	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah fasilitasi peningkatan pelayanan perizinan	6 Desa	6 Desa	14.360.000	5 Desa	1.023.200	6 Desa	1.125.520	6 Desa	1.238.072	6 Desa	1.361.879	6 Desa	1.361.879	6 Desa	20.470.550	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
	38.13	Fasilitasi Peningkatan wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan	6 Desa	6 Desa	40.952.000	5 Desa	37.699.500	6 Desa	41.469.450	6 Desa	45.616.395	6 Desa	50.178.035	6 Desa	50.178.035	6 Desa	266.093.414	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR



RENSTRA PERUBAHAN PERUBAHAN Kecamatan Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

			Wawasan Kebangsaan																		
38.	16	Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Jumlah desa yang diberikan fasilitasi pemberdayaan keluarga sejahtera	6 Desa	6 Desa	24.999.400	5 Desa	8.482.900	6 Desa	9.331.190	6 Desa	10.264.309	6 Desa	11.290.740	6 Desa	11.290.740	6 Desa	75.659.279	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
38.	19	Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa dalam Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelesaian tapal batas antar desa dalam Kecamatan	5 Desa	5 Desa	10.538.450	5 Desa	4.279.700	6 Desa	4.707.670	6 Desa	5.178.437	6 Desa	5.696.281	6 Desa	5.696.281	6 Desa	36.096.818	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
		Fasilitasi Kegiatan Sosial di Masyarakat	Jumlah fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	-	6 Desa	10.000.000	5 Desa	8.482.900	6 Desa	9.331.190	6 Desa	10.264.309	6 Desa	11.290.740	6 Desa	11.290.740	6 Desa	60.659.879	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	40.909.800	100%	26.282.800	100%	28.911.080	100%	31.802.188	100%	34.982.407	100%	34.982.407	100%	197.870.682	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
06.	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Lakip tahunan SKPD	1 Dokumen	1 Doku men	6.105.000	1 Dokume n	5.061.400	1 Dokume n	5.567.540	1 Doku men	6.124.294	1 Dokum en	6.736.723	1 Doku men	6.736.723	6 Doku men	36.331.681	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
06.	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Dokumen laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Doku men	6.065.000	1 Dokume n	1.632.800	1 Dokume n	1.796.080	1 Doku men	1.975.688	1 Dokum en	2.173.257	1 Doku men	2.173.257	6 Doku men	15.816.082	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
06.	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Doku men	9.918.700	1 Dokume n	5.280.100	1 Dokume n	5.808.110	1 Doku men	6.388.921	1 Dokum en	7.027.813	1 Doku men	7.027.813	6 Doku men	41.451.457	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
		Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Dokumen Rencana Strategis SKPD	-	1 Doku men	-	1 Dokume n	-	1 Dokume n	-	1 Doku men	-	1 Dokum en	-	1 Doku men	-	2 Doku men	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
06.	08	Penyusunan rencana kerja, RKA, DPA dan DPPA	Dokumen rencana kerja, RKA, DPA dan DPPA	-	4 Doku men	13.328.200	4 Dokume n	9.227.600	4 Dokume n	10.150.360	4 Doku men	11.165.396	4 Dokum en	12.281.936	4 Doku men	12.281.936	48 Doku men	68.435.427	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
06.	12	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ)	Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD	2 Dokumen	2 Doku men	5.492.900	2 Dokume n	5.080.100	2 Dokume n	5.588.110	2 Doku men	6.146.921	2 Dokum en	6.761.613	2 Doku men	6.761.613	24 Doku men	35.831.257	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
17.		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	100%	100%	48.000.000											100%	48.000.000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
17.	67	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah peserta Bimtek pengelolaan keuangan SKPD	2 Orang	2 Orang	29.900.000	2 Orang	-	2 Orang	-	2 Orang	-	2 Orang	-	2 Orang	-	12 Oran g	29.900.000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
17.	87	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Dokumen Penataan Aset SKPD	1 Dokumen	1 Doku men	29.173.000	1 Dokume n	4.084.100	1 Dokume n	4.492.510	1 Doku men	4.941.761	1 Dokum en	5.435.937	1 Doku men	5.435.937	6 Doku men	53.563.245	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	
21.		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	5.072.500	100%	3.580.500	100%	3.938.550	100%	4.332.405	100%	4.765.646	100%	4.765.646	100%	26.455.246	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR	



RENSTRA PERUBAHAN PERUBAHAN Kecamatan Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

		21.80	Penyusunan sistem informasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Sistem informasi, monitoring, evaluasi pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.072.500	1 Dokumen	3.580.500	1 Dokumen	3.938.550	1 Dokumen	4.332.405	1 Dokumen	4.765.646	1 Dokumen	4.765.646	5 Dokumen	26.455.246	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
		15.	Program Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	-	100%	14.950.000	100%	24.700.000	100%	27.170.000	100%	29.887.000	100%	32.875.700	100%	32.875.700	100%	162.458.400	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
		15.01	Pelaksanaan Lomba Desa	Jumlah Desa yang diberikan penilaian dalam Lomba Desa	-	6 Desa	14.950.000	6 Desa	24.700.000	6 Desa	27.170.000	6 Desa	29.887.000	6 Desa	32.875.700	6 Desa	32.875.700	6 Desa	162.458.400	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
		15.	Program Pembinaan Mental dan Spritual Umat Beragama	Persentase Peningkatan Pembinaan Mental dan Spritual Umat Beragama	-	100%	19.010.200	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	19.010.200	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
		15.02	Penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	700.000.000	1 Kegiatan	770.000.000	1 Kegiatan	847.000.000	1 Kegiatan	847.000.000	1 Kegiatan	3.164.000.000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
		15.01	Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	-	1 Kegiatan	19.010.200	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	20.911.220	1 Kegiatan	23.002.342	1 Kegiatan	25.302.576	1 Kegiatan	25.302.576	3 Kegiatan	113.528.914	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Perubahan Strategis (Renstra) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam uraian kegiatan tersebut perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan dari SKPD yang bersangkutan.

Kriteria indikator kinerja kegiatan tersebut harus dapat menggambarkan hal-hal seperti tersebut di bawah ini :

- Spesifik dan jelas, sehingga tidak memungkinkan terjadinya kesalahan interpretasi;
- Dapat diukur secara obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
- Relevan, yaitu indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan dengan TUPOKSI, tujuan serta manfaat dan dampak;
- Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran dan hasil serta manfaat dan dampak;
- Cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian dengan pelaksanaan kegiatan;
- Efektif, data/informasi yang terkait dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan sumber daya yang tersedia;
- Dievaluasi secara terus menerus setiap tahun untuk dapat memenuhi tuntutan *stakeholders* dan pencapaian visi dan misi organisasi.



**Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERUBAHAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020-2025**

No.	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perubahan Tahun 201-2024			
											Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (Good Governance)	T.1	Meningkatnya Budaya Kerja dan tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	S.2.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
				2	Nilai Sakip	S.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	2	Nilai Sakip	Predikat	CC	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
				3	Opini BPK			3	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatkan penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal	T.6	Meningkatnya Kemandirian Desa	1	Indeks Desa Membangun	S.27	Meningkatnya Status Desa	1	Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	Desa	0,00	8,00	16,00	24,00	32,00	40,00	48,00	48,00	48,00	



BAB VIII PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil, maka dipandang perlu menfokuskan kegiatan atau aktivitas instansi sehingga pelaksanaan kegiatan akan sesuai dengan Rencana Perubahan dan sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu langkah untuk menuju suatu pemerintahan yang baik, responsive terhadap aspirasi masyarakat dan juga dapat dikontrol oleh semua pihak, dilakukan dengan penyusunan Rencana Perubahan Strategis (Renstra).

Dokumen Rencana Perubahan Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Kuala Mandor B merupakan dokumen pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Perubahan Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang telah ditetapkan sekaligus merupakan sarana yang efektif untuk mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya dan sebagai bahan masukan bagi perbaikan kinerja SKPD pada tahun berikutnya.

Kuala Mandor B, Januari 2022
CAMAT KUALA MANDOR B

Ir. Nurwanti, M.M
Pembina Tk I
NIP. 19650424 199703 2 001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	5,072,500	100%	3,580,500	100%	3,938,550							100%
		21.80	Penyusunan sistem informasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Sistem informasi, monitoring, evaluasi pembangunan	1 Dokumen	1 Dok	5,072,500	1 Dok	3,580,500	1 Dok	3,938,550							5 Dokumen
		15.	Program Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	-	100%	14,950,000	100%	24,700,000	100%	27,170,000							100%
		15.01	Pelaksanaan Lomba Desa	Jumlah Desa yang diberikan penilaian dalam Lomba Desa	-	6 Desa	14,950,000	6 Desa	24,700,000	6 Desa	27,170,000							6 Desa
		15.	Program Pembinaan Mental dan Spritual Umat Beragama	Persentase Peningkatan Pembinaan Mental dan Spritual Umat Beragama	-	100%	19,010,200	100%	-	100%	-							100%
		15.02	Penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	700,000,000							1 Kegiatan
		15.01	Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	-	1 Kegiatan	19,010,200	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	20,911,220							3 Kegiatan
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								20,759,412		33,000,000		12,350,000		30,000,000	
		07.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								20,759,412		33,000,000		12,350,000		30,000,000	
		07.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah						5 dok	10,335,560.00	5 dok	15,000,000.00	5 dok	1,850,000.00	5 dok	19,500,000.00	20 dok
		07.01.01.201.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						1 dok	1,557,426	1 dok	8,000,000	1 dok	1,500,000	1 dok	1,500,000	4 dok
		07.01.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat						4 dok	8,866,426	4 dok	10,000,000	4 dok	9,000,000	4 dok	9,000,000	4 dok
		07.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,766,832,106		#####		1,809,663,909		1,809,663,909	
		07.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS penerima Gaji dan Tunjangan						12	1,764,256,412	12	1,806,163,909	12	1,806,163,909	12	1,806,163,909	48 bln
		07.01.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 dok	2,211,968	1 dok	10,000,000	1 dok	3,000,000	1 dok	3,000,000	4 dok
		07.01.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan						1 dok	363,726	1 dok	1,500,000	1 dok	500,000	1 dok	500,000	4 dok
		07.01.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								-		4,349,668		5,225,519		6,298,652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		07.01.01.203.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								1 Dokumen	1,299,976	1 Dokumen	1,538,798	1 Dokumen	1,896,169	4 Dokumen
		07.01.01.203.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								1 Kegiatan	1,549,857	1 Kegiatan	1,898,756	1 Kegiatan	2,234,586	4 Kegiatan
		07.01.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah								1 Kegiatan	1,499,835	1 Kegiatan	1,787,965	1 Kegiatan	2,167,897	4 Kegiatan
		07.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								240,329,190		327,805,206		290,172,000		343,752,000	
		07.01.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel								20	23,400,000			20	20,000,000	40
		07.01.01.205.11	Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti BIMTEK								4 org	25,000,000	4 org	40,000,000	5 org	72,000,000	13 org
		07.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat								181,964,045		215,598,603		185,372,000		186,137,000	
		07.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Penyediaan komponen instalasi								12 bln	3,000,000	12 bln	3,300,000	12 bln	3,500,000	36 bln
		07.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12 bln	58,365,145	12 bln	60,806,603	12 bln	61,500,000	12 bln	62,115,000	48 bln
		07.01.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						12 bln	13,176,900	12 bln	13,350,000	12 bln	13,450,000	12 bln	13,600,000	48 bln
		07.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12 bln	1,440,000	12 bln	1,460,000	12 bln	1,440,000	12 bln	1,440,000	48 bln
		07.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan						192 oh	108,982,000	292 oh	139,982,000	192 oh	108,982,000	192 oh	108,982,000	868 oh
		07.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah								187,343,574		142,000,000		70,000,000		27,000,000	
		07.01.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit								3 unit	-					3 unit
		07.01.01.207.05	Pengadaan Meubelair	Jumlah Unit								2 set	20,000,000			2 set	18,000,000	4 set
		07.01.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10 unit	74,178,324	7 unit	82,000,000	12 unit	50,000,000	5 Unit	25,000,000	34 unit
		07.01.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau						250 bh	113,165,250	8 Unit	60,000,000	2 Unit	20,000,000	2 Unit	2,000,000	12 Unit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		07.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan								98,853,668		100,753,668		98,853,668		98,853,668	
		07.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air						12 bln	17,600,000	12 bln	18,500,000	12 bln	17,600,000	12 bln	17,600,000	48 bln
		07.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12 bln	81,253,668	12 bln	82,253,668	12 bln	81,253,668	12 bln	81,253,668	48 bln
		07.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan								2,915,810		4,725,810		3,725,810		3,725,810	
		07.01.01.209.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan						9 unit	725,810	9 unit	725,810	9 unit	725,810	9 unit	725,810	36 unit
		07.01.01.209.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3 unit	2,190,000	6 unit	4,000,000	6 unit	3,000,000	6 unit	3,000,000	21 unit
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN								631,698,190		35,000,000		31,700,000		31,700,000	
		07.01.02.202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah								1,700,000		7,000,000		1,700,000		1,700,000	
		07.01.02.202.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah Dokumen pelayanan di kecamatan						1 dok	1,700,000	1 dok	7,000,000	1 dok	1,700,000	1 dok	1,700,000	4 dok
		07.01.02.204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Pelayanan Perijinan								629,998,190		28,000,000		30,000,000		30,000,000	
		07.01.02.204.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non pelayanan perijinan	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan								40 rekomendasi	5,000,000	40 rekomendasi	5,000,000	40 rekomendasi	5,000,000	120 rekomendasi
		07.01.02.204.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan	Jumlah ijin yang dikeluarkan								80 Surat	5,000,000	80 Surat	5,000,000	80 Surat	5,000,000	240 Surat
		07.01.02.204.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan	Jumlah kegiatan/ even di kecamatan						1 keg	629,998,190	1 keg	18,000,000	1 keg	20,000,000	1 keg	20,000,000	4 keg
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KOTA								43,600,000		45,500,000		44,300,000		44,300,000	
		07.01.03.201	Koordinasi Kegiatan Masyarakat								43,600,000		45,500,000		44,300,000		44,300,000	
		07.01.03.201	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah kegiatan/ even di kecamatan						1 keg	25,600,000	1 keg	27,500,000	1 keg	26,300,000	1 keg	26,300,000	4 keg

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		07.01.03.201.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Desa Pembinaan						1 keg	18,000,000	1 keg	18,000,000	1 keg	18,000,000	1 keg	18,000,000	4 keg
		07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN								28,000,000		42,460,000		28,000,000		28,000,000	
		07.01.04.202	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan								28,000,000		42,460,000		28,000,000		28,000,000	
		07.01.04.202.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumah desa pembinaan dan sosialisasi karhutla						2 keg	28,000,000	2 keg	42,460,000	2 keg	28,000,000	2 keg	28,000,000	8 keg
		07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								18,000,000		18,000,000		19,000,000		20,000,000	
		07.01.05.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								18,000,000		18,000,000		19,000,000		20,000,000	
		.01'07.01.05.201	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Jumlah kegiatan/ even di kecamatan						1 keg	18,000,000	1 keg	18,000,000	1 keg	19,000,000	1 keg	20,000,000	4 keg
		07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								125,458,000		182,934,000		186,815,000		191,315,000	
		07.01.06.201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan								125,458,000		182,934,000		186,815,000		191,315,000	
		07.01.06.201.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumah desa pembinaan						6 desa	62,465,000	6 desa	73,978,000	6 desa	75,000,000	6 desa	78,000,000	24 desa
		07.01.06.201.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumah desa pembinaan						6 desa	3,363,000	6 desa	3,000,000	6 desa	3,500,000	6 desa	4,000,000	24 desa
		07.01.06.201.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumah desa pembinaan						6 desa	27,815,000	6 desa	40,978,000	6 desa	41,500,000	6 desa	42,500,000	24 desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		07.01.06.201.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan	Jumah desa pembinaan						2 desa	2,400,000	2 desa	24,000,000	2 desa	2,400,000	2 desa	2,400,000	8 desa
		07.01.06.201.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	Jumah desa pembinaan						6 desa	29,415,000	6 desa	40,978,000	6 desa	64,415,000	6 desa	64,415,000	24 desa

RAYA

	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
Kinerja Pada Priode Akhir		
Rp		
20	21	22
917,434,740	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
68,400,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
13,815,750	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
240,433,250	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
64,771,140	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
36,904,600	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
82,800,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
5,580,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR

20	21	22
52,260,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
65,730,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
286,740,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
558,127,350	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
90,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
207,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
208,837,500	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
11,100,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
21,028,500	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
8,070,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
21,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
42,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
42,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
152,075,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR

20	21	22
0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
150,225,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
31,500,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
31,500,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
34,125,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
34,125,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
61,085,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
61,085,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
18,879,050	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
18,879,050	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
24,702,620	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR

20	21	22
0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
9,007,410	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
15,695,210	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
832,063,320	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
111,257,280	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
111,257,280	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
109,757,280	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
106,917,280	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
19,966,550	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
25,862,280	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
5,963,390	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
66,661,760	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
28,759,830	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
16,508,720	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
120,120,950	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR

20	21	22
42,813,490	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
19,525,820	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
27,814,090	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
96,103,680	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
16,733,940	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
9,493,880	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
21,006,910	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
32,706,160	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
16,161,110	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
48,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
29,900,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
37,749,610	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR

20	21	22
12,591,550	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
12,591,550	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
66,820,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
66,820,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
19,010,200	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
700,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
39,921,420	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
96,109,412	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
96,109,412	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
46,685,560	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
12,557,426	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
36,866,426	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
7,203,823,833	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
7,182,748,139	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
18,211,968	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
2,863,726	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
15,873,839	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR

20	21	22
4,734,943	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
5,683,199	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
5,455,697	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
1,202,058,396	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
43,400,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
137,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
769,071,648	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
9,800,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
242,786,748	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
53,576,900	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
5,780,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
466,928,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
426,343,574	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
38,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
231,178,324	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
195,165,250	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR

20	21	22
397,314,672	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
71,300,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
326,014,672	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
15,093,240	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
2,903,240	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
12,190,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
730,098,190	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
12,100,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
12,100,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
717,998,190	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
15,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
15,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
687,998,190	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
177,700,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
177,700,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
105,700,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR

20	21	22
72,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
126,460,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
126,460,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
126,460,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
75,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
75,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
75,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
686,522,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
686,522,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
289,443,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
13,863,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
152,793,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR

20	21	22
31,200,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
199,223,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018					
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3
						Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat 2. Meningkatkan kemandirian Desa	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Jumlah Desa yang Berstatus Mandiri	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	268,995,900	100%	308,780,400	100%
		01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	12 Bulan	-	-	-	-	-
		01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	18,000,000	12 Bulan	24,000,000	12 Bulan
		01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	-	9 Unit	-	9 Unit	-	9 Unit
		01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	6,082,500	12 Bulan	3,682,500	12 Bulan
		01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	77,163,500	12 Bulan	77,747,500	12 Bulan
		01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	22,047,900	12 Bulan	20,344,400	12 Bulan
		01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	9,802,000	12 Bulan	12,906,000	12 Bulan
		01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	12 Bulan	38,000,000	12 Bulan
		01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	1,800,000	12 Bulan	1,800,000	12 Bulan
		01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pembayaran penyediaan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat pegawai	12 kali	12 kali	19,500,000	12 kali	15,600,000	12 kali
		01.17	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2 Orang	2 Orang	25,200,000	2 Orang	19,300,000	2 Orang
		01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	72 bulan	12 bulan	86,400,000	12 bulan	95,400,000	12 bulan
		01.23	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen (SOP) SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-
		02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				154,500,000	100%	192,203,500
02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan Sepeda Motor	-	-	-	4 Unit	90,000,000	-		

02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	123,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket
02.09	Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	123,000,000	1 Paket	40,875,000	1 Paket
02.09	Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan Meubelair Kantor	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 Unit	3 Unit	11,100,000	9 Unit	-	9 Unit
02.30	Pemeliharaan rutin gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor	0	1 paket	2,400,000	1 paket	18,628,500	-
02.30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala komputer	3 Unit	3 Unit	2,400,000	3 Unit	2,700,000	5 Unit
01.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	21,000,000			100%
01.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	20 Setel	22 Setel	21,000,000	-		22 Setel
01.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik Tradisional	-	22 Setel	21,000,000	22 Setel		22 Setel
01.06	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	20 Setel	-	-	-		-
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	10,850,000	100%	67,250,000	100%
05.07	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Jumlah dokumen Evaluasi Jabatan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen
05.10	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	Jumlah dokumen Analisis Jabatan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen
05.10	Bintek Peraturan perundang undangan	Jumlah peserta Bintek	2 org		9,000,000	5 org	67,250,000	5 org
15.	Program optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	tersedianya web kecamatan	100%	100%	-	100%	15,000,000	100%
15.01	Pembuatan Website	Jumlah web di kecamatan	6 web	1 web	-	1 web	15,000,000	1 web
15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Event Seni dan Budaya	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	16,250,000	1 Kegiatan
15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	even/ kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	16,250,000	1 Kegiatan
15.07	Pagelaran Adat Budaya Daerah	even/ kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan
16.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		100%	26,960,000	100%	16,250,000	100%
16.12	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Even/ kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	-	1 kegiatan	26,960,000	1 kegiatan	16,250,000	1 kegiatan
20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	-	-	-	-	-	-
20.18	Penyelenggaraan Open Turnamen Sepakbola Bupati Cup	Terselenggaranya kegiatan Turnamen Bupati Cup	-	-	-	-	-	-
22.	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase Penurunan Titik Hotspot Dalam Setahun	100%	100%	11,360,000	100%	3,580,500	1

22.03	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan	Jumlah Sosialisasi kebijakan kebakaran hutan	-	1 Kegiatan	11,360,000	1 Kegiatan	3,580,500	1 Kegiatan
33.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Desa		100%	11,037,500	100%	6,507,200	100%
33.26	Penyusunan Database E-Formasi	dokumendatabase E-Formasi	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen
33.27	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	dokumenStandar Kompetensi Jabatan SKPD	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen
33.29	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah pelaksanaan kualitas peningkatan pelayanan publik	-	12 bulan	5,265,000	12 bulan	1,782,100	12 bulan
33.32	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	DokumenSurvey KepuasanMasyarakat (SKM)	-	1 Dokumen	5,772,500	1 Dokumen	4,725,100	1 Dokumen
33.33	Penyusunan Standar Pelayanan	Dokumen Standar Pelayanan SKPD	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen
38.	Program Pemberdayaan Kecamatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kecamatan	100%	100%	370,905,000	100%	219,599,200	100%
38.01	Pembinaan Pemerintah Desa	Jumlah desa yang diberikan pembinaan pemerintahan desa	6 Desa	6 Desa	47,419,800	6 Desa	30,398,800	6 Desa
38.02	Pembinaan Sosial Kearsyarakatan	Jumlah desa yang diberikan pembinaan sosial	6 Desa	6 Desa	47,419,800	6 Desa	30,398,800	6 Desa
38.03	Pembinaan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah desa yang diberikan pembinaan dan koordinasi	6 Desa	6 Desa	45,919,800	6 Desa	30,398,800	6 Desa
38.04	Pembinaan Ketertaman dan Ketertiban	Jumlah desa yang diberikan pembinaan ketertaman dan ketertiban	6 Desa	5 Desa	46,019,800	5 Desa	28,998,800	6 Desa
38.05	Penataan Kearsipan	Jumlah pelaksanaan penataan kearsipan sesuai porsinya	12 bulan	12 bulan	19,966,550	12 bulan	-	12 bulan
38.06	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumenProfil Kecamatan Kuala Mandor B	1 Dokumen	1 Dokumen	16,020,000	1 Dokumen	4,686,800	1 Dokumen
38.08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Jumlah fasilitasi peningkatan pelayanan kependudukan	5 Desa	5 Desa	2,360,000	5 Desa	1,715,900	6 Desa
38.09	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan tingkat Kecamatan	5 Desa	5 Desa	32,449,400	6 Desa	16,291,600	6 Desa
38.10	Fasilitasi dan pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Jumlah fasitiasi dan pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	6 Desa	6 Desa	12,480,000	6 Desa	7,752,300	6 Desa
38.11	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah fasilitasi peningkatan pelayanan perizinan	6 Desa	6 Desa	14,360,000	5 Desa	1,023,200	6 Desa
38.13	Fasilitasi Peningkatan wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan Wawasan Kebangsaan	6 Desa	6 Desa	40,952,000	5 Desa	37,699,500	6 Desa
38.16	Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Jumlah desa yang diberikan fasilitasi pemberdayaan keluarga sejahtera	6 Desa	6 Desa	24,999,400	5 Desa	8,482,900	6 Desa
38.19	Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa dalam Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelesaian tapal batas antar desa dalam Kecamatan	5 Desa	5 Desa	10,538,450	5 Desa	4,279,700	6 Desa

	Fasilitasi Kegiatan Sosial di Masyarakat	Jumlah fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	-	6 Desa	10,000,000	5 Desa	8,482,900	6 Desa
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	40,909,800	100%	26,282,800	100%
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Lakip tahunan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6,105,000	1 Dokumen	5,061,400	1 Dokumen
06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Dokumen laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	6,065,000	1 Dokumen	1,632,800	1 Dokumen
06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9,918,700	1 Dokumen	5,280,100	1 Dokumen
	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Dokumen Rencana Strategis SKPD	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen
06.08	Penyusunan rencana kerja, RKA, DPA dan DPPA	Dokumen rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	-	4 Dokumen	13,328,200	4 Dokumen	9,227,600	4 Dokumen
06.12	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5,492,900	2 Dokumen	5,080,100	2 Dokumen
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	100%	100%	48,000,000			
17.67	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah peserta Bimtek pengelolaan keuangan SKPD	2 Orang	2 Orang	29,900,000	2 Orang	-	2 Orang
17.87	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Dokumen Penataan Aset SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	29,173,000	1 Dokumen	4,084,100	1 Dokumen
21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	5,072,500	100%	3,580,500	100%
21.80	Penyusunan sistem informasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Sistem informasi, monitoring, evaluasi pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	5,072,500	1 Dokumen	3,580,500	1 Dokumen
15.	Program Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	-	100%	14,950,000	100%	24,700,000	100%
15.01	Pelaksanaan Lomba Desa	Jumlah Desa yang diberikan penilaian dalam Lomba Desa	-	6 Desa	14,950,000	6 Desa	24,700,000	6 Desa
15.	Program Pembinaan Mental dan Spritual Umat Beragama	Persentase Peningkatan Pembinaan Mental dan Spritual Umat Beragama		100%	19,010,200	100%	-	100%
15.02	Penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan
15.01	Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	-	1 Kegiatan	19,010,200	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
(2021)	Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Tahun-6 (2024)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Akhir			
Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
339,658,440	100%	373,624,284	100%	410,986,712	100%	452,085,384	100%	2,154,131,120	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	-	-	-	-	-	-	72 Bulan	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
26,400,000	12 Bulan	29,040,000	12 Bulan	31,944,000	12 Bulan	35,138,400	72 Bulan	164,522,400	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	9 Unit	-	9 Unit	-	9 Unit	-	9 Unit	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
4,050,750	12 Bulan	4,455,825	12 Bulan	4,901,408	12 Bulan	5,391,548	12 Bulan	28,564,531	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
85,522,250	12 Bulan	94,074,475	12 Bulan	103,481,923	12 Bulan	113,830,115	12 Bulan	551,819,762	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
22,378,840	12 Bulan	24,616,724	12 Bulan	27,078,396	12 Bulan	29,786,236	12 Bulan	146,252,496	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
14,196,600	12 Bulan	15,616,260	12 Bulan	17,177,886	12 Bulan	18,895,675	72 Bulan	88,594,421	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
41,800,000	12 Bulan	45,980,000	12 Bulan	50,578,000	12 Bulan	55,635,800	72 Bulan	234,993,800	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
1,980,000	12 Bulan	2,178,000	12 Bulan	2,395,800	12 Bulan	2,635,380	72 Bulan	12,789,180	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
17,160,000	12 kali	18,876,000	12 kali	20,763,600	12 kali	22,839,960	72 kali	114,739,560	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
21,230,000	2 Orang	23,353,000	2 Orang	25,688,300	2 Orang	28,257,130	12 Orang	143,028,430	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
104,940,000	12 bulan	115,434,000	12 bulan	126,977,400	12 bulan	139,675,140	72 Orang	668,826,540	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
211,423,850	100%	232,566,235	100%	255,822,859	100%	255,822,859	100%	1,302,339,302	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	2 unit	-	-	-	-	-	6 Unit	90,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR

44,000,000	1 Paket	48,400,000	1 Paket	53,240,000	1 Paket	53,240,000	6 Paket	361,880,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
44,962,500	1 Paket	49,458,750	1 Paket	54,404,625	1 Paket	54,404,625	6 Paket	367,105,500	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	6 Paket	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	9 Unit	-	9 Unit	-	9 Unit	-	54 Unit	11,100,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	-	-	-	-	1 paket	-	2 paket	21,028,500	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
2,970,000	5 Unit	3,267,000	5 Unit	3,593,700	5 Unit	3,593,700	26 Unit	18,524,400	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	-	-	100%	-	-	-	100%	21,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
21,000,000	22 Setel	23,100,000	22 Setel	25,410,000	22 Setel	25,410,000	62 Setel	115,920,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
21,000,000	22 Setel	23,100,000	22 Setel	25,410,000	22 Setel	25,410,000	66 Setel	115,920,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	-	-	-	-	-	-	-	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
73,975,000	100%	81,372,500	100%	89,509,750	100%	89,509,750	100%	412,467,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	6 Dokumen	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	6 Dokumen	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
73,975,000	5 org	81,372,500	5 org	89,509,750	5 org	89,509,750	30 orang	410,617,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
16,500,000	100%	18,150,000	100%	19,965,000	100%	19,965,000	100%	89,580,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
16,500,000	1 web	18,150,000	1 web	19,965,000	1 web	19,965,000	6 web	89,580,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
17,875,000	1 Kegiatan	19,662,500	1 Kegiatan	21,628,750	1 Kegiatan	21,628,750	6 Kegiatan	97,045,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
17,875,000	1 Kegiatan	19,662,500	1 Kegiatan	21,628,750	1 Kegiatan	21,628,750	6 Kegiatan	97,045,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	3 Kegiatan	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
17,875,000	100%	19,662,500	100%	21,628,750	100%	21,628,750	100%	124,005,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
17,875,000	1 kegiatan	19,662,500	1 kegiatan	21,628,750	1 kegiatan	21,628,750	6 kegiatan	124,005,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	-	-	-	-	-	-	1	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
3,938,550	100%	4,332,405	100%	4,765,646	100%	4,765,646	100%	32,742,746	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR

3,938,550	1 Kegiatan	4,332,405	1 Kegiatan	4,765,646	1 Kegiatan	4,765,646	6 Kegiatan	32,742,746	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
7,157,920	100%	7,873,712	100%	8,661,083	100%	8,661,083	100%	49,898,498	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	6 dokumen	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	6 dokumen	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
1,960,310	12 bulan	2,156,341	12 bulan	2,371,975	12 bulan	2,371,975	72 bulan	15,907,701	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
5,197,610	1 Dokumen	5,717,371	1 Dokumen	6,289,108	1 Dokumen	6,289,108	6 Dokumen	33,990,797	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	6 Dokumen	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
241,559,120	100%	265,715,032	100%	292,286,535	100%	321,515,189	100%	1,711,580,076	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
33,438,680	6 Desa	36,782,548	6 Desa	40,460,803	6 Desa	40,460,803	6 Desa	228,961,434	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
33,438,680	6 Desa	36,782,548	6 Desa	40,460,803	6 Desa	40,460,803	6 Desa	228,961,434	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
33,438,680	6 Desa	36,782,548	6 Desa	40,460,803	6 Desa	40,460,803	6 Desa	227,461,434	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
31,898,680	6 Desa	35,088,548	6 Desa	38,597,403	6 Desa	38,597,403	6 Desa	219,200,634	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	72 bulan	19,966,550	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
5,155,480	1 Dokumen	5,671,028	1 Dokumen	6,238,131	1 Dokumen	6,238,131	6 Dokumen	44,009,570	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
1,887,490	6 Desa	2,076,239	6 Desa	2,283,863	6 Desa	2,283,863	6 Desa	12,607,355	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
17,920,760	6 Desa	19,712,836	6 Desa	21,684,120	6 Desa	21,684,120	6 Desa	129,742,835	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
8,527,530	6 Desa	9,380,283	6 Desa	10,318,311	6 Desa	10,318,311	6 Desa	58,776,736	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
1,125,520	6 Desa	1,238,072	6 Desa	1,361,879	6 Desa	1,361,879	6 Desa	20,470,550	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
41,469,450	6 Desa	45,616,395	6 Desa	50,178,035	6 Desa	50,178,035	6 Desa	266,093,414	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
9,331,190	6 Desa	10,264,309	6 Desa	11,290,740	6 Desa	11,290,740	6 Desa	75,659,279	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
4,707,670	6 Desa	5,178,437	6 Desa	5,696,281	6 Desa	5,696,281	6 Desa	36,096,818	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR

9,331,190	6 Desa	10,264,309	6 Desa	11,290,740	6 Desa	11,290,740	6 Desa	60,659,879	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
28,911,080	100%	31,802,188	100%	34,982,407	100%	34,982,407	100%	197,870,682	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
5,567,540	1 Dokumen	6,124,294	1 Dokumen	6,736,723	1 Dokumen	6,736,723	6 Dokumen	36,331,681	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
1,796,080	1 Dokumen	1,975,688	1 Dokumen	2,173,257	1 Dokumen	2,173,257	6 Dokumen	15,816,082	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
5,808,110	1 Dokumen	6,388,921	1 Dokumen	7,027,813	1 Dokumen	7,027,813	6 Dokumen	41,451,457	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen	0	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
10,150,360	4 Dokumen	11,165,396	4 Dokumen	12,281,936	4 Dokumen	12,281,936	48 Dokumen	68,435,427	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
5,588,110	2 Dokumen	6,146,921	2 Dokumen	6,761,613	2 Dokumen	6,761,613	24 Dokumen	35,831,257	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	-	-	-	-	-	-	100%	48,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	2 Orang	-	2 Orang	-	2 Orang	-	12 Orang	29,900,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
4,492,510	1 Dokumen	4,941,761	1 Dokumen	5,435,937	1 Dokumen	5,435,937	6 Dokumen	53,563,245	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
3,938,550	100%	4,332,405	100%	4,765,646	100%	4,765,646	100%	26,455,246	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
3,938,550	1 Dokumen	4,332,405	1 Dokumen	4,765,646	1 Dokumen	4,765,646	5 Dokumen	26,455,246	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
27,170,000	100%	29,887,000	100%	32,875,700	100%	32,875,700	100%	162,458,400	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
27,170,000	6 Desa	29,887,000	6 Desa	32,875,700	6 Desa	32,875,700	6 Desa	162,458,400	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	19,010,200	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
700,000,000	1 Kegiatan	770,000,000	1 Kegiatan	847,000,000	1 Kegiatan	847,000,000	1 Kegiatan	3,164,000,000	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR
20,911,220	1 Kegiatan	23,002,342	1 Kegiatan	25,302,576	1 Kegiatan	25,302,576	3 Kegiatan	113,528,914	Kecamatan Kuala Mandor B	KKR

tabel 2.6

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KUALA MANDOR

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Kinerja Lainnya	Target Renstra Perubahan SKPD Tahun ke-						Realisasi	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	100 / sangat baik	79,9 / baik	80,1 / baik	81 / baik	82 / baik	100 / sangat baik	100 / sangat baik	79,9 / baik	80,1 / baik
2	Jumlah Desa Mandiri *	-	-	5 Desa	1 Desa	1 Desa	2 Desa	3 Desa	4 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa
3	Predikat (Nilai) LAKIP Kecamatan Kuala Mandor B *)	-	-	B	C	C	CC	CC	B	B	C	C

Keterangan :

* target 2019 desa mandiri na Menyesuaikan dengan perubahan renstra RPJMD 2019-

*) Bukan Indikator Kinerja Utama

NDOR B KABUPATEN KUBU RAYA

sasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-					
2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
81 / baik	82 / baik	82 / baik	86 / baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 Desa	2 Desa	2 Desa	na	100%	100%	100%	100%	100%	na
C	BB	BB	na	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2024

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

NO	URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI	
		1	2	3	4	5	1	2
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
	PROGRAM PEENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
	Sistem Informasi Perencanaan SKPD	7,500,000	8,490,000	9,339,000	10,272,900	11,300,190	7,500,000	8,490,000
	Penyelenggaraan Penyusunan Rencana strategis (Renstra)	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	-
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12,500,000	7,024,650	12,000,000	20,000,000	21,000,000	3,901,704	3,854,704
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3,000,000	4,050,000	4,050,000	4,252,500	4,465,125	3,000,000	4,050,000
	Jasa Kebersihan Kantor	38,920,000	38,920,000	44,802,600	1,100,000	1,200,000	38,920,000	38,920,000
	Penyediaan alat Tulis Kantor	14,000,000	14,000,000	15,624,000	15,500,000	16,000,000	14,000,000	14,000,000
	Penyediaan barang Cetak dan P Cetak	8,000,000	8,567,000	9,837,000	10,328,850	10,845,293	8,000,000	8,567,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,300,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,800,000	-	1,800,000	1,500,000	1,600,000	-	-
	Penyediaan makan dan Minum	8,000,000	6,000,000	12,000,000	6,900,000	7,200,000	8,000,000	6,000,000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	15,000,000	7,500,000	15,900,000	16,695,000	17,529,750	-	7,500,000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	25,000,000	29,550,000	43,520,000	45,696,000	47,980,800	24,780,000	29,500,000
	Penyusunan Standar Operasional	10,000,000	-	5,000,000	5,250,000	5,512,500	4,681,925	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	12,600,000	43,577,000	15,000,000	15,000,000	-	12,600,000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	9,000,000	40,500,000	129,320,000	15,000,000	15,000,000	8,500,000	40,500,000
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas	7,125,000	4,000,000	8,520,000	800	800	7,124,000	4,000,000
	Pemeliharaan rutin / berkala komputer	1,800,000	1,200,000	2,400,000	2,000,000	2,000,000	900	1,200,000
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	11,520,000	-	11,000,000		8,000,000	6,800,000	-

Pengadaan Pakaian Olahraga	3,250,000	-	-		8,000,000	3,520,000	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR							
Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	5,000,000	5,000,000	6,000,000	6,300,000	6,615,000	1,999,900	1,999,900
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur							
Bintek Peraturan Perundang Undangan	#####	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							
Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	7,500,000	7,500,000	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,398,000	5,500,000
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	10,000,000	10,000,000	3,966,000	4,164,300	4,372,515	5,000,000	8,901,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	20,000,000	11,527,000	9,000,000	9,450,000	9,922,500	19,497,950	10,291,000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	15,000,000	13,000,000	5,000,000	5,250,000	5,512,500	10,335,425	12,999,875
Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	0	0	0	0	13328200	10,335,425	12,999,875
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN							
Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan	-	24,500,000	-	-	26960000		24,499,700
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD							
Peningkatan Kapasitas pengelolah Keuangan SKPD	20,000,000	27,210,000	35,080,000	36,834,000	38,675,700	14,540,000	23,510,000
Fasilitasi Penataan aset Pada SKPD	10,000,000	6,132,000	9,000,000	9,450,000	9,922,500	9,999,800	5,879,800
PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN							
Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	-	10,000,000	13,250,000	13,912,500	14,608,125	-	9,909,700
PROGRAM PEMBINAANDAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH							

Peningkatan Kualitas pelayanan publik	-	5,804,500	5,000,000	5,250,000	5,512,500	-	2,804,500
PEMBERDAYAAN KECAMATAN							
Pembinaan pemerintahan Desa	25,000,000	22,854,250	37,450,000	39,322,500	41,288,625	22,205,000	21,950,000
Pembinaan Sosial kemasyarakatan	25,000,000	22,933,625	37,450,000	39,322,500	41,288,625	21,146,500	21,389,500
pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan	25,000,000	22,999,625	37,450,000	39,322,500	41,288,625	20,952,500	19,326,500
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	27,500,000	24,820,000	37,450,000	39,322,500	41,288,625	23,707,275	22,627,275
Penataan kearsipan	14,000,000	14,000,000	18,531,000	19,457,550	20,430,428	12,049,975	13,393,975
Penyusunan profil kecamatan	14,000,000	7,000,075	15,185,000	15,944,250	16,741,463	13,147,850	6,369,925
Fasilitasi Pelayanan Kependudukan	10,000,000	10,000,000	10,707,000	11,242,350	11,804,468	9,938,325	9,938,550
Pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan tingkat kecamatan	25,000,000	25,000,000	31,062,000	32,615,100	34,245,855	24,999,825	24,999,825
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan perizinan	40,480,000	31,385,350	14,550,500	15,278,025	16,041,926	34,479,500	28,284,625
Fasilitasi Peningkatan Wawasan kebangsaan	20,000,000	20,000,000	62,771,000	65,909,550	69,205,028	18,049,900	19,375,900
terfasilitasinya pemberdayaan keluarga sejahtera	21,500,000	23,000,000	23,541,000	24,718,050	25,953,953	19,610,900	20,710,900
terfasilitasinya pembinaan posvandu	3,000,000	3,000,000	-	-	-	2,280,000	2,559,000
terfasilitasinya pembinaan monografi	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000
meningktanya peran dan tugas RT/RW	-	-	-	-	-		
terfasilitasinya tapal batas antas desa	7,000,000	7,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	6,535,500	6,264,750
terfasilitasinya penyusunan indeks kepuasan masyarakat	10,000,000	-	-	-	-	2,550,000	-

tabel 2.7.

I KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA

INDIKATOR CAPAIAN TAHUN KE			RASIO CAPAIAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
3	4	5	1	2	3	4	5		
2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9,339,000	9,759,255	5072500	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	8.54%	7.44%
-	-	-	1.00	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
4,392,978	19,000,000	#####	0.31	0.55	0.37	0.95	0.95	10.93%	38.59%
4,050,000	4,039,875	#####	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	8.28%	7.17%
44,802,600	1,045,000	#####	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	-50.13%	-50.64%
15,624,000	14,725,000	#####	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	2.71%	1.66%
9,837,000	9,812,408	#####	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	6.27%	5.19%
3,000,000	1,235,000	#####	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	6.96%	5.87%
1,800,000	1,425,000	#####	-	-	1.00	0.95	0.95	-2.33%	0.00%
12,000,000	6,555,000	#####	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	-2.09%	-3.08%
7,950,000	15,860,250	#####	-	1.00	0.50	0.95	0.95	3.17%	0.00%
43,070,000	43,411,200	#####	0.99	1.00	0.99	0.95	0.95	13.93%	12.96%
5,000,000	4,987,500	0	0.47	-	1.00	0.95	0.95	-11.23%	2.27%
43,575,000	14,250,000	#####	-	1.00	1.00	0.95	0.95	0.00%	0.00%
118,250,000	14,250,000	#####	0.94	1.00	0.91	0.95	0.95	10.76%	10.89%
8,520,000	760	0.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	-35.43%	-36.08%
2,400,000	1,900,000	#####	0.50	1.00	1.00	0.95	0.95	2.13%	16.12%
9,350,000	-	#####	0.59	-	0.85	-	0.95	-7.03%	2.25%

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecam

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		
					2019	
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,00 / Sangat Baik
2	Meningkatnya kemandirian Desa	Jumlah Desa yang Berstatus Mandiri	Meningkatnya Status Desa	2	Jumlah Desa yang naik kategori	1 Desa
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	Predikat (Nilai) LAKIP Kecamatan Kuala Mandor B	70,32 / BB

atan Kuala Mandor B

Target Kinerja				
2020	2021	2022	2023	2024
81,35 / Sangat Baik	81,37 / Sangat Baik	82,00 / Sangat Baik	83,00 / Sangat Baik	84,00 / Sangat Baik
1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	2 Desa
72,66 / BB	74,31 / BB	76,26 / BB	78,00 / BB	80,00 / Sangat Baik

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN I
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Budaya kerja dan Tata kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	T.1 Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	1 Indeks Kepuasan Masyarakat 2 Nilai SAKIP	S.1 Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat S.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

